



# Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Kepmendagri Nomor  
900.1.15.5-1317 Tahun 2023



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 Telp. 0321-874549  
JOMBANG

## KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 yang akan berakhir seiring dengan masa jabatan Kepala Daerah saat ini. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun terdahulu, Cascading Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang sudah disesuaikan dengan Permendagri 050-5889 Tahun 2021 sebagai salah satu hasil reviu internal, serta dokumen pendukung lainnya. Sejalan dengan reviu internal terhadap Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Renstra, serta Isu Strategis OPD.

Rencana Strategis (Renstra) Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian Tahun 2024-2026 yang ditangani oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang pada tahun 2024, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Sektor Perdagangan dan Sektor Perindustrian.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah menyusun dan menganggarkan program dan kegiatan yang berbasis Gender yang tertuang dalam pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG).

Semoga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan acuan dalam perencanaan kedepan sehingga dapat mendukung keberhasilan kegiatan pembangunan dibidang perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Jombang serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Jombang,

2023

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN JOMBANG



**Drs. SUWIGNYO, M.M.**

NIP. 196601161993021001

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Dasar Hukum Penyusunan.....	3
3. Maksud dan Tujuan .....	4
4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.....	7
2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	18
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	21
4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah .....	25
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2. Isu Strategis .....	35
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD/Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada : .....	38
a. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026	
b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah	
2. Cascading Kinerja PD mulai dari Tujuan, Sasaran, outcome, dan Output serta indikatornya masing-masing .....	38
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>54</b>
- Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	
- Rencana Pengarustamaan Gender (PUG)	
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>65</b>
1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD	
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).	
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>69</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 yang akan berakhir seiring dengan masa jabatan Kepala Daerah saat ini.

#### **1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Renstra PD tersebut juga dalam rangka penyesuaian Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Hasil pencapaian kemajuan pembangunan di Kabupaten Jombang yang diukur dari penilaian evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2021 dan target capaian kinerja pembangunan pada tahun 2021-2023 yang menjadi tolok ukur kinerja pembangunan di Kabupaten Jombang. Permasalahan-permasalahan dan isu strategis

yang merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan di tahun 2024-2026 khususnya dalam rangka penanganan dampak dan pemulihan ekonomi dan sosial akibat Pandemi Covid 19. Beberapa permasalahan terkait dengan urusan perdagangan antara lain: Belum optimalnya akses perluasan pasar bagi komoditas unggulan; Masih lemahnya aspek perlindungan konsumen; serta Belum terpenuhinya sarana prasarana pasar daerah (16 pasar) yang sesuai SNI dan Masih rendahnya kesadaran/kepedulian pedagang dan pengunjung pasar terhadap perawatan/ pemeliharaan dan kebersihan tempat berjualan. Sedangkan Permasalahan terkait dengan urusan perindustrian antara lain: Rendahnya nilai tambah hasil produk industri kecil dan menengah karena masih sedikitnya industri kecil dan menengah yang mengakses teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk; Masih rendahnya kualitas dan daya saing produk IKM industri dibandingkan produk luar negeri dan daerah lain karena masih sedikit produk industri kecil dan menengah yang memiliki standardisasi produk; Masih belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif di daerah; Masih belum terwujudnya Kawasan Industri Di Daerah; Masih belum optimalnya pertumbuhan potensi sentra-sentra industri di daerah karena masih terbatasnya infrastruktur industri di wilayah pedesaan dan belum tertatanya informasi sentra industri; serta Masih belum optimalnya jejaring IKM dan Industri Besar (IB).

Terbatasnya informasi mengenai Peta Potensi Produk Unggulan dan peluang investasi di kabupaten Jombang, mengakibatkan kalah bersaing dengan daerah sekitar dan kurang dikenal masyarakat luas. Namun, terkait regulasi Produk Unggulan Daerah tersebut, pada tahun 2021 telah disusun melalui Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah, dengan Komoditi produk unggulan industri dan jasa antara lain : Manik-manik, Meubel, Dompot, Daur Ulang Aluminium, Alat Dapur, Cor Kuningan, Anyaman Pandan, Batik Tulis, Genteng, Olahan Kopi Ekselsa, dan Tape Ketan Hijau.

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang disusun berlandaskan pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang berkembang dan mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023, juga memberikan gambaran dan identifikasi permasalahan yang dihadapi serta indikasi terkait dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai pemecahan permasalahan secara terencana, sistematis, dan akomodatif dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Dengan demikian, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan Rencana

Strategi (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026.

## 2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Daerah (DOB);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi rencana Pembangunan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian perdagangan Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian perindustrian Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jombang tahun 2009– 2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 75 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang;
19. Peraturan Bupati Jombang tentang Nomor..... Tanggal 17 Juli 2023 Perubahan Penetapan Renstra PD Tahun 2024-2026.

### 3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di sektor perdagangan dan Industri.
3. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan guna menunjang pencapaian target kinerja terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

Tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 mempunyai hubungan yang sinergis dan implementatif dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) dan Rencana Kerja (Renja) tahun N-1.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang khususnya dalam menjalankan agenda rencana pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD. Untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja Dinas Perdagangan Perindustrian yang dalam penyusunannya mengacu pada RPKD Kabupaten Jombang.

Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam UU nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian, selanjutnya substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

#### **4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Renstra PD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
  2. Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD/Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada :
    - a. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026
    - b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah
  2. Cascading Kinerja PD mulai dari Tujuan, Sasaran, outcome, dan Output serta indikatornya masing-masing
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- Memuat strategi dan arah kebijakan Perang Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
- BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- Menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhirannya).
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.
  2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Sejalan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, dalam hal tersebut berimplikasi dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 75 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang.

Bahwa Tugas Pokok Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Jombang di bidang perdagangan dan bidang perindustrian. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi sesuai dengan yang tertuang dalam Bab III pasal 4 Peraturan Bupati Jombang Nomor 75 Tahun 2021, yakni:

Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan Pemerintah Daerah di bidang perdagangan dan bidang perindustrian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Perindustrian, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pengembangan dan Distribusi, membawahi:
  1. Kelompok Jabatan Fungsional

- d. Bidang Sarana Perdagangan dan Barang Pokok Penting membawahi;
  - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Kemetrolagian, membawahi :
  - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Perindustrian, membawahi:
  - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.
  - Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Berikut adalah paparan tugas pokok dan fungsi aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sebagai berikut:

## **SEKRETARIAT**

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatakelolaan keuangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;

- h. Pengelolaan aset;
- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan;
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja (RKA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan (LK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) di lingkup Dinas;
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan Publik (SPP);
- n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapannya, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan serta pemeliharaan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
- g. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasioanal Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan inovasi pendukung kebijakan daerah;

- h. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- i. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

### **Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan anggaran;
- d. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- e. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **Bidang Pengembangan dan Distribusi**

Tugas pokok Bidang Pengembangan dan Distribusi adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian di bidang promosi, distribusi dan pembinaan perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan dan Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
- b. Pengkoordinasian kegiatan ekspor, impor dan perdagangan luar negeri;
- c. Penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, pasar lelang, temu usaha, misi dagang, pasar ramadhan dan kawasan agropolitan;
- d. Penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- e. Pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- f. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten;
- g. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan pelaku usaha informal dan formal;
- h. Merumuskan bahan penyuluhan pembinaan pelaku usaha;

- i. Pelaksanaan promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi pelaku usaha sektor perdagangan dalam rangka menciptakan hubungan kemitraan usaha yang strategis;
- j. Pembinaan pelaku usaha penjangkauan peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan dalam pameran dagang nasional, internasional dan pameran dagang lokal; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

### **Bidang Sarana Perdagangan dan Barang Pokok Penting**

Tugas pokok Bidang Sarana Perdagangan dan Barang Pokok Penting adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian di bidang pengelolaan sarana perdagangan, pengembangan sumber daya manusia perdagangan dan pengendalian barang pokok penting.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sarana Perdagangan dan Barang Pokok Penting mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
- b. Perumusan pembangunan dan revitalisasi sarana Perdagangan;
- c. Perumusan pengembangan sumber daya manusia dan penataan sarana perdagangan;
- d. Perumusan pelayanan retribusi perdagangan;
- e. Penyediaan data, informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- f. Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- g. Koordinasi lintas sektoral dan *stakeholder* untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah;
- h. Penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
- i. Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan *Liquid Petroleum Gas* bersubsidi;
- j. Koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen, distributor dan pengecer di tingkat daerah; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

## Bidang Kemetrolgian

Tugas pokok Bidang Kemetrolgian adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian di bidang pelayanan metrologi legal, pengawasan metrologi legal serta penegakan hukum metrologi legal.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kemetrolgian mempunyai fungsi:

- a. Perumusan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang metrologi legal;
- b. Penyusunan pedoman/petunjuk teknis pembinaan kegiatan metrologi legal;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan kegiatan metrologi legal;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan metrologi legal;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan metrologi legal;
- f. Mengkoordinasikan dan kerjasama metrologi legal;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan metrologi legal;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan hukum metrologi legal;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja bidang metrologi legal; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

## Bidang Perindustrian

Tugas pokok Bidang Perindustrian adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian di bidang pengendalian, pengawasan dan standartisasi Industri Kecil Menengah, bina usaha industri serta pengembangan industri kreatif dan industri hijau.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. Perumusan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Perindustrian;
- b. Penyusunan perencanaan pembangunan industri Daerah sesuai dengan RPJMD, bahan kebijakan, bimbingan teknis serta pedoman pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha, standartisasi produk serta pengendalian dan pengawasan di bidang industri;
- c. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri;
- d. Penyusunan perencanaan pengembangan Sistem informasi industri di bidang industri;
- e. Penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi legalitas industri dan penyebarluasan informasi proses produksi atau hasil produk industri di bidang industri;

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha, pengembangan sistem informasi industri, standartisasi produk dan pengendalian di bidang industri;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

### **Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar, mempunyai tugas pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan di bidang pengelolaan pasar di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), (UPT) Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan di lingkungan pasar
- b. Melaksanakan program kerja dan kebijakan teknis yang menyangkut administrasi dan proses untuk retribusi pasar
- c. Melaksanakan program tindak lanjut dan kebijakan teknis yang ditetapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian meliputi : keamanan, ketertiban, dan kebersihan, pengawasan pengendalian dan pelaporan yang berkaitan dengan pelayanan pasar
- d. Melaksanakan pembinaan terhadap petugas pemungut retribusi pasar untuk menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi retribusi pasar
- e. Melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengendalian dan perawatan sarana dan prasarana pasar, untuk menjamin agar bangunan dan fasilitas teknis lainnya tetap bersih dan siap pakai
- f. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi berkaitan dengan kegiatan pelayanan pasar
- g. Melaksanakan tertib administrasi dalam pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan pasar dalam hubungan penarikan retribusi daerah
- h. Melaksanakan dan mengelola tugas ketatausahaan UPT Pasar
- i. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

### **Koordinator Wilayah Kerja**

Koordinator Wilayah Kerja, mempunyai tugas:

- a. Mengelola kegiatan pengelolaan Pasar
- b. Menganalisis evaluasi dan pelaporan keselamatan pengelola Pasar
- c. Mengarahkan dan mengendalikan peraturan pemanfaatan dan pengawasan kios serta lahan lingkungan pasar
- d. Mengarahkan dan mengendalikan permintaan Pasar
- e. Mengarahkan dan mengendalikan Monitoring kegiatan penataan Pasar
- f. Mengarahkan dan mengendalikan teknis operasional teknik penagihan retribusi pasar
- g. Mengarahkan dan mengendalikan teknis perpasaran yang meliputi kegiatan pengembangan pasar dan penataan pedagang serta ketertiban pasar
- h. Mempelajari memahami dan melaksanakan peraturan perundang undangan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pengelolaan pasar
- i. Memberi saran pertimbangan teknis-teknis penyelenggaraan urusan pengelolaan pasar
- j. Membagi Tugas dan menjelaskan kewenangan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- k. Membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku
- l. Membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar dapat berjalan lancar
- m. Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan atasan

### **Juru Pungut Retribusi**

Juru Pungut Retribusi, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan retribusi pasar
- b. Melakukan penagihan retribusi dan pungutan pasar serta menyetorkan ke kas daerah
- c. Menyiapkan laporan hasil retribusi pasar dalam bentuk akuntabilitas
- d. Membuat pengajuan karcis retribusi untuk tarikan retribusi harian kepada bendahara penerimaan pembantu pasar
- e. Menarik retribusi pelayanan pasar dengan menggunakan karcis retribusi
- f. Menghitung jumlah nominal tarikan retribusi dan sisa karcis retribusi kepada pengatminitrasian penerimaan
- g. Mencatat setiap penarikan retribusi pelayanan pasar
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan atasan

### **Pengelola Keamanan/ketertiban**

Pengelola Keamanan/ketertiban, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan seksi ketertiban dan keamanan pasar berdasarkan data kegiatan sebelumnya sebagai bahan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan di 16 pasar
- b. Melakukan pengecekan prasarana pasar di 16 pasar untuk memastikan kondisinya
- c. Membuat laporan tentang kejadian-kejadian penting di 16 pasar pada buku laporan hasil perjalanan dinas
- d. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi keamanan dan ketertiban dilingkungan pasar agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
- e. Menertibkan para pedagang dan masyarakat pemakai jasa pasar, supaya menggalakkan keamanan dan ketertiban dilingkungannya
- f. Melakukan pengontrolan lingkungan di 16 pasar untuk memastikan kondisi keamanan dan ketertiban pasar

### **Pengadministrasi Umum**

Pengadministrasi Umum, mempunyai tugas :

- a. Menerima, mencatat, dan melakukan penyortiran terhadap surat-surat yang masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian;
- b. Memberi lembar pengantar pada surat (dalam hal ini adalah surat masuk), sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
- c. Mengelompokkan surat-surat atau dokumen Menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
- d. Mendokumentasikan surat-surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi;
- e. Membuka surat-surat yang masuk, kemudian meneliti nomor, tanggal, dan perihal serta memberi lembaran disposisi untuk diedarkan sesuai dengan maksud dan tujuan surat;
- f. Mencatat dan memberi nomor, tanggal, dan perihal surat pada buku agenda surat masuk maupun surat keluar dan menyampaikannya kepada unit tata usaha untuk diberi disposisi;
- g. Mencatat surat-surat yang masuk ke dalam buku ekspedisi unit kerja sesuai dengan disposisi pimpinan untuk diserahkan kepada yang bersangkutan;
- h. Memantau dan melakukan pengecekan surat yang diproses berdasarkan catatan pada buku agenda pada unit yang bersangkutan;
- i. Mencatat surat yang akan disimpan atau keluar pada buku ekspedisi serta menyerahkannya kepada Caraka untuk disampaikan kepada yang bersangkutan;
- j. Melakukan pencatatan terhadap nomor dan tanggal surat keluar sesuai dengan nomor dan tanggal pada buku agenda untuk memudahkan pengecekan sewaktu-waktu diperlukan;
- k. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis

### **Tenaga Keamanan**

Tenaga Keamanan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengamanan secara menyeluruh di lokasi pasar
- b. Melindungi dan mengayomi lingkungan/tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Pasar
- c. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.
- d. Melaksanakan penyusunan program kerja, menganalisa laporan-laporan Pedagang dan Konsumen terkait peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan ketentraman dan ketertiban Pasar
- e. Perumusan dan pelaksanaan mengatur dan pembinaan petugas ketertiban pasar serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi di lingkungan pasar sehubungan dengan keamanan dan lingkungan Pasar
- f. Pengendalian pengawasan dalam pembinaan terhadap pedagang yang tidak tertib sesuai dengan apa yang di tentukan Pasar
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **Tenaga Kebersihan**

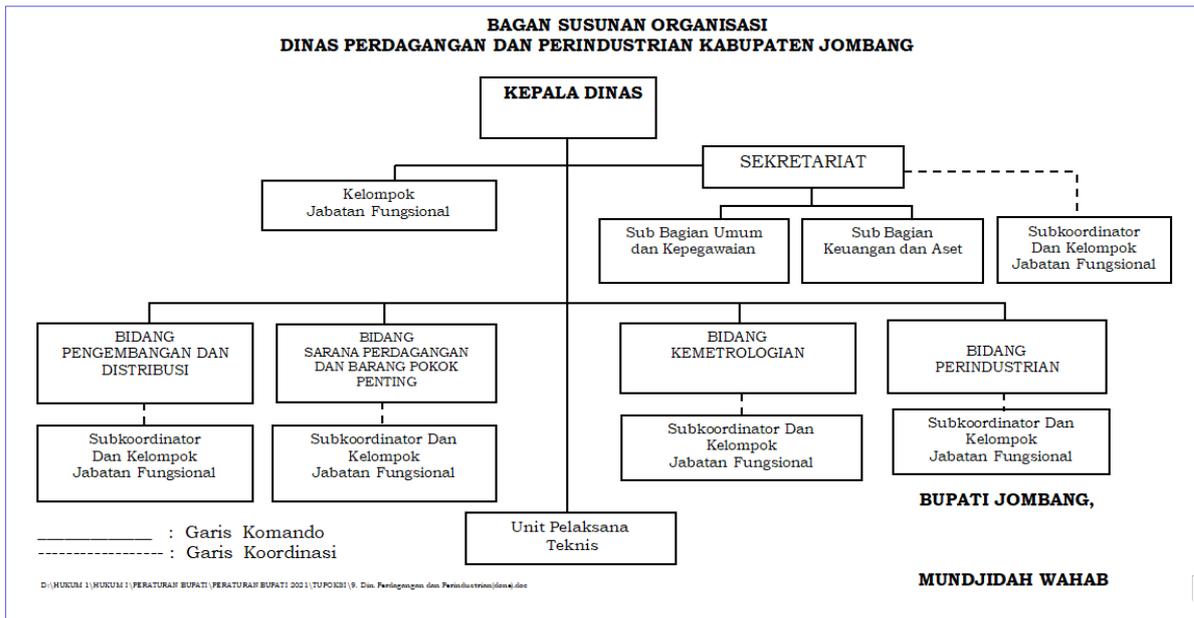
Tenaga Kebersihan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan kebersihan Pasar
- b. Memelihara ketertiban pembuangan sampah dan limbah pasar pada tempat pembuangan sampah yang di sediakan (TPS) membina dan memotivasi kebersihan di lingkungan pedagang dan masyarakat pemakai jasa Pasar
- c. Melaksanakan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/intansi/ lembaga atau pihak terkait dalam penanganan/ pengelolaan sampah
- d. Melaksanakan penyediaan air untuk pencucian tangan di tandon yang sudah di sediakan Pasar, membersihkan gorong-gorong penyaluran air yang tersumbat sampah dan lain-lain.
- e. Membersihkan area Pasar dan mengingatkan penjual dan pembeli untuk tetap menjaga kebersihan
- f. Melaksanakan pemeliharaan alat/sarana prasarana yang tersedia di Pasar
- g. Melaksanakan tugas yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

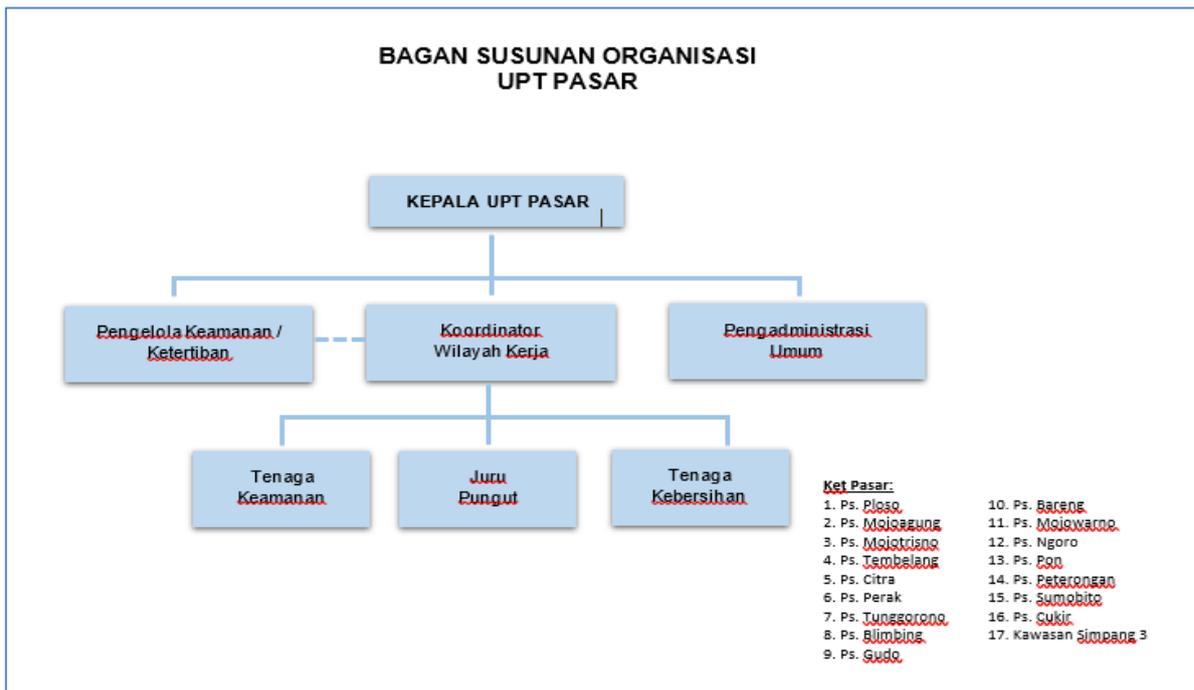
Adapun bagan susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang tertuang pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 75 Tahun 2021 sebagaimana terlampir.

a. Bagan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian



Sumber : Disdagrin Kabupaten Jombang, Januari 2021

b. Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pasar

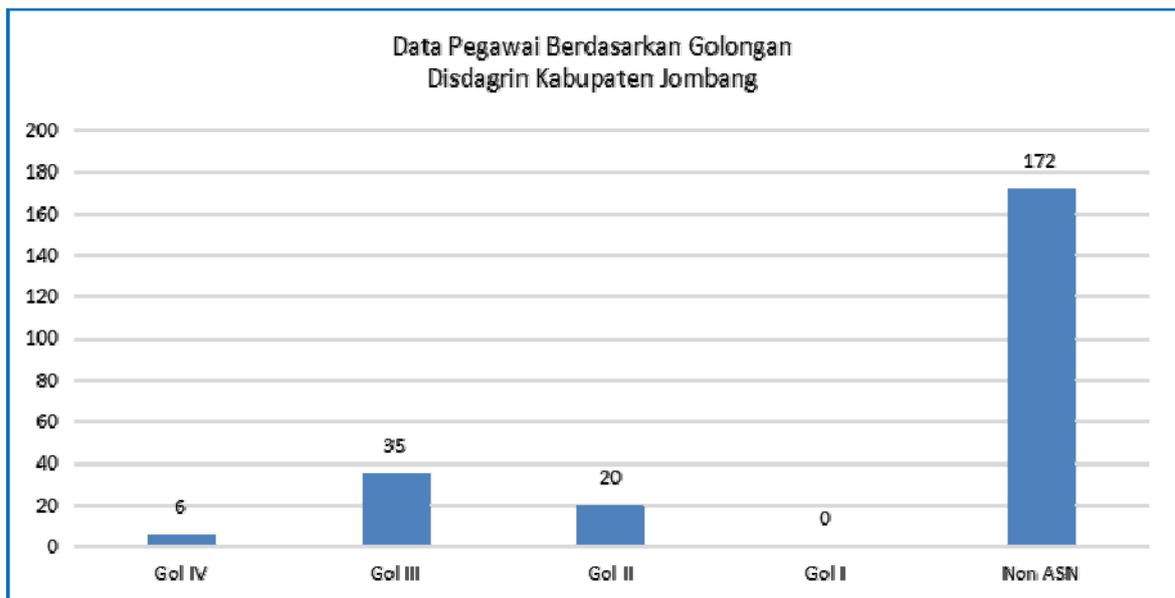


Sumber : Disdagrin Kabupaten Jombang, Januari 2021

## 2. Sumber Daya Perangkat Daerah

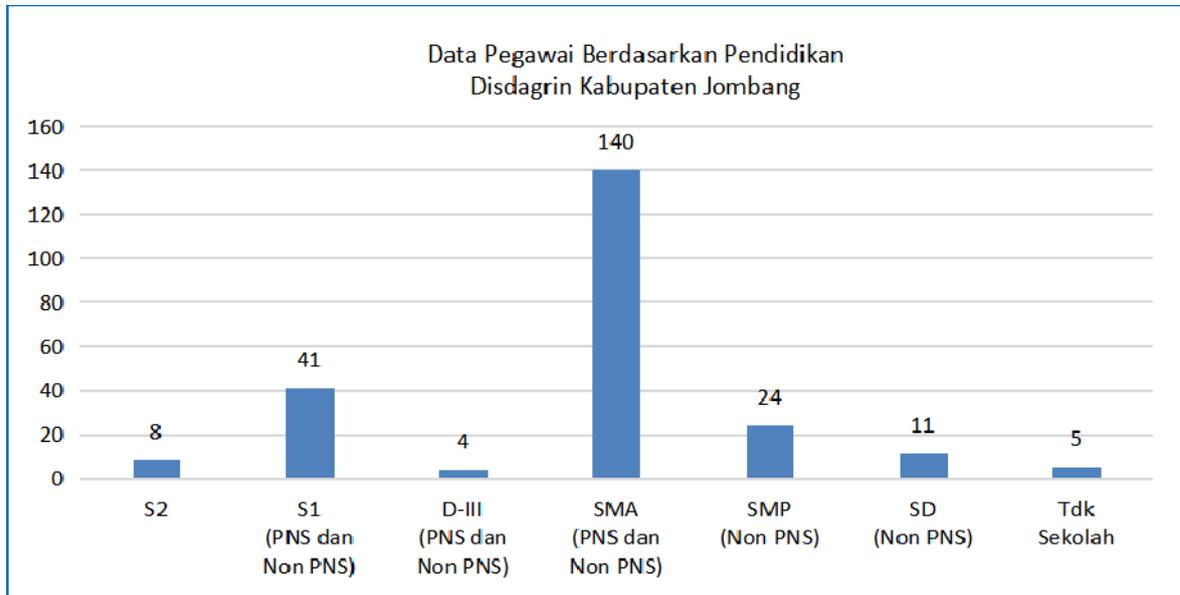
Pegawai/aparatur merupakan elemen terpenting dalam sebuah organisasi. Pegawai/aparatur memiliki peran strategis dan dominan pada pencapaian tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya aparatur/manusia secara tepat dan terarah sangat dibutuhkan sehingga pegawai/aparatur dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang.

Demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsinya, saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang didukung oleh 233 personil yang terdiri dari 61 orang berstatus pegawai negeri sipil dan 172 lainnya adalah tenaga honorer. Berikut ini adalah grafik berdasarkan pembagian komposisi berdasarkan golongan :



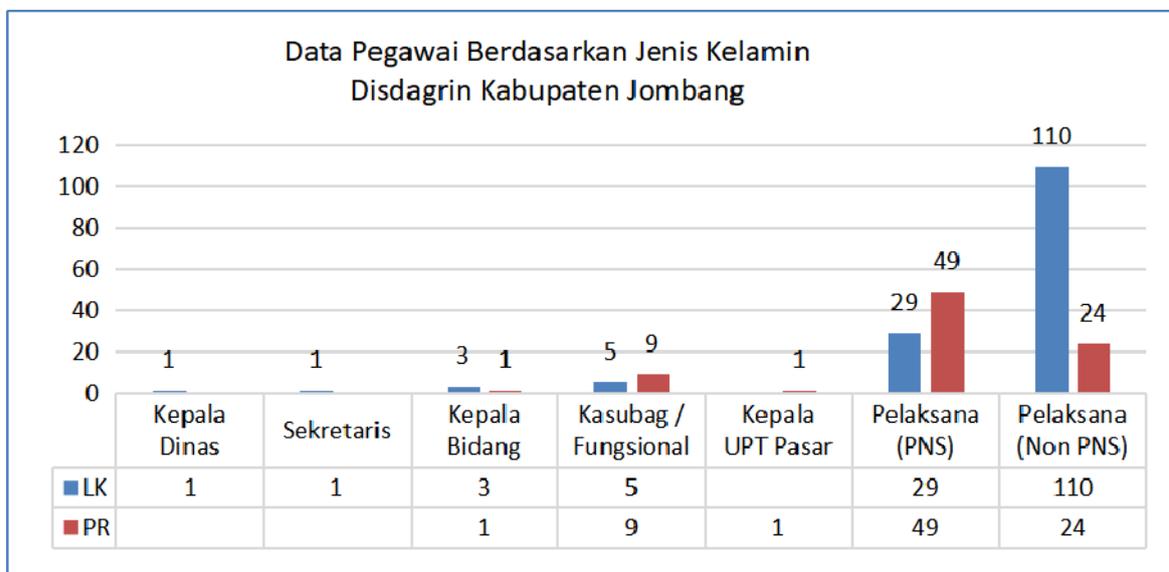
Sumber : Disdagrin Kabupaten Jombang, Januari 2022

Selanjutnya, adalah grafik komposisi pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang berdasarkan pendidikan



Sumber : Disdagrin Kabupaten Jombang, Januari 2022

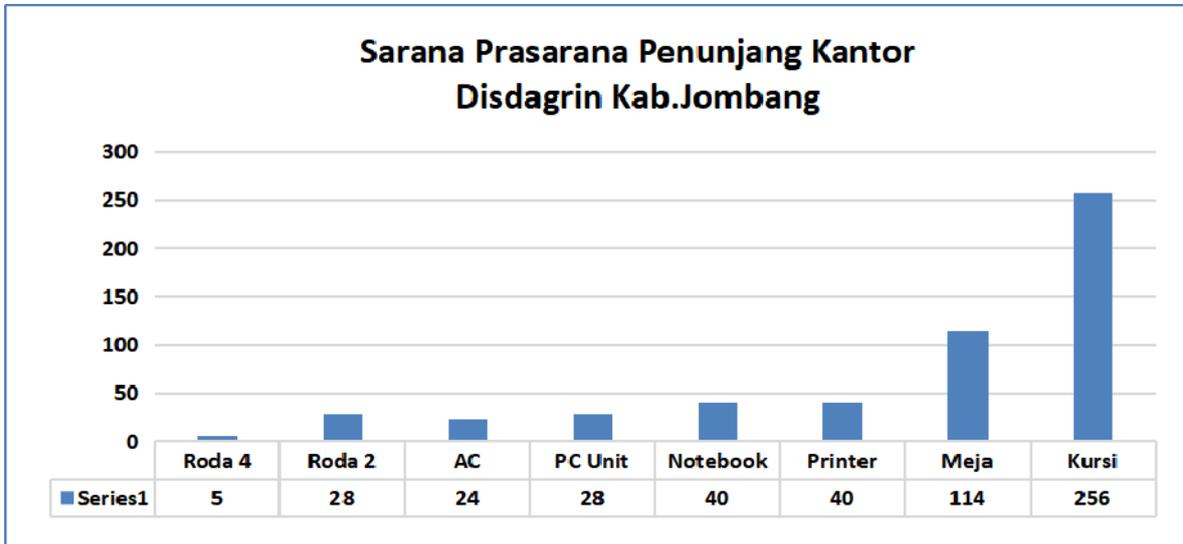
Selanjutnya, adalah grafik komposisi pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Disdagrin Kabupaten Jombang, Januari 2022

Disisi lain, untuk menunjang kinerja pegawai / aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Saat ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Adapun

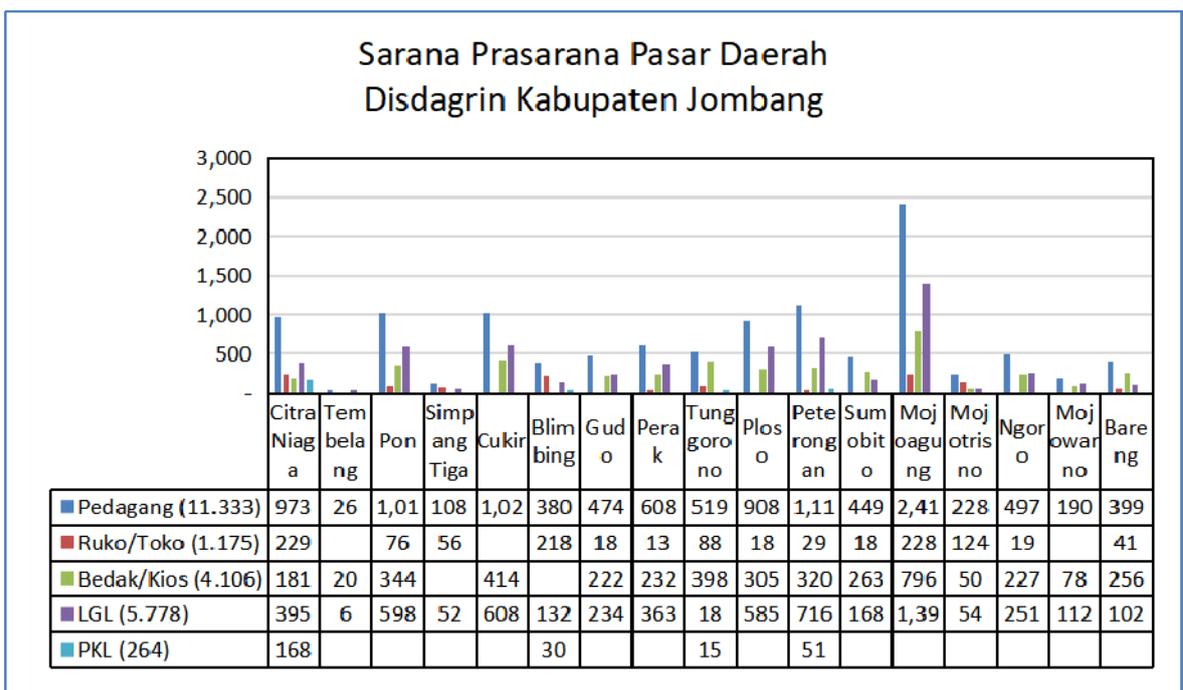
sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagaimana grafik berikut berikut :



Sumber : Disdagrin Kabupaten Jombang, Januari 2022

### Pasar Daerah

Dari enam belas pasar daerah dan satu pertokoan simpang tiga yang dikelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang memiliki jumlah ruko/toko 1.175 unit, bedak/Kios 4.106 unit, PKL dalam pasar 264 unit dan 5.778 unit los/gledek/lesehan, dengan pedagang yang ikut terlibat didalamnya sebanyak 11.333 orang pedagang. Berikut ini adalah grafik sarana prasarana pasar daerah adalah sebagai berikut :



Sumber : Disdagrin Kabupaten Jombang, Januari 2022

Jenis komoditi yang ada di masing-masing pasar daerah dapat dirinci sebagaimana tertera pada tabel 2.1 berikut :

No.	Jenis Sarpras	Jenis Komoditi
1.	Ruko/Toko	Terdiri dari : - Pakaian - Sepatu - Klontong - Helm - Emas - Bahan bangunan, dll - Alat listrik
2.	Bedak/Kios	Terdiri dari : - Sayuran - Klontong - Ikan hias - Nasi, dll
3.	LGL/PKL	Terdiri dari : - Ayam - Daging/Bakso - Ikan segar - Kelapa - Tahu - Tempe - Sayuran - Bumbu - Klontong - STMJ - Buah - Jajanan pasar, dll
4.	Kamar daging	Terdiri dari : - Daging sapi - Daging ayam - Daging Kambing - Ikan segar, dll

### Pedagang Kaki Lima

Dari tiga lokasi paguyuban pedagang kaki lima (PKL) yang dikelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sampai dengan Januari 2021 hasil pendataan di Kecamatan khususnya di kawasan aloon-alon dan kawasan Kebonrojo sebanyak 350 pedagang kaki lima dengan berbagai komoditi sebagaimana tertera pada tabel 2.2 berikut :

No.	Lokasi / Area	Jenis Komoditi
1	Alun-Alun Jombang dan Kebonrojo	Terdiri dari : - Makanan - Minuman - Mainan - Rokok - Souvenir - Pakaian - Dompot - Asesoris, dll

### 3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian kabupaten Jombang, tingkat capaian kinerja berdasarkan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024-2026 maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2021-2022 dapat dijelaskan bahwa pencapaian kinerja pelayanan sampai dengan akhir tahun 2022 dengan indikator kinerja dapat mencapai sasaran (berhasil) dari 10 program yang dilaksanakan. Adapun indikator kinerja tersebut adalah diantaranya sebagai berikut:

### **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**

Jumlah rekomendasi ijin usaha toko swalayan (IUTS) yang diterbitkan dengan realisasi 17 rekomendasi ijin usaha dari target 10 rekomendasi ijin usaha sehingga tercapai 170%. Jumlah rekomendasi ijin usaha Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan dengan realisasi 11 rekomendasi ijin usaha dari target 8 rekomendasi ijin usaha sehingga tercapai 138%. Jumlah rekomendasi ijin usaha Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang diterbitkan dengan realisasi sebagaimana jumlah target yaitu 6 rekomendasi ijin usaha sehingga tercapai 100%.

### **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

Jumlah PAD Retribusi dengan realisasi Rp.5.032.710.764,00 dari target Rp.4.499.836.140,00 sehingga tercapai 110.84%. Jumlah prasarana distribusi perdagangan yang tercukupi dengan realisasi sebagaimana jumlah target yaitu 32 unit sehingga tercapai 100%. Jumlah perlengkapan kebersihan pasar yang tercukupi dengan realisasi sebagaimana jumlah target yaitu 4.498 unit sehingga tercapai 90%.

### **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

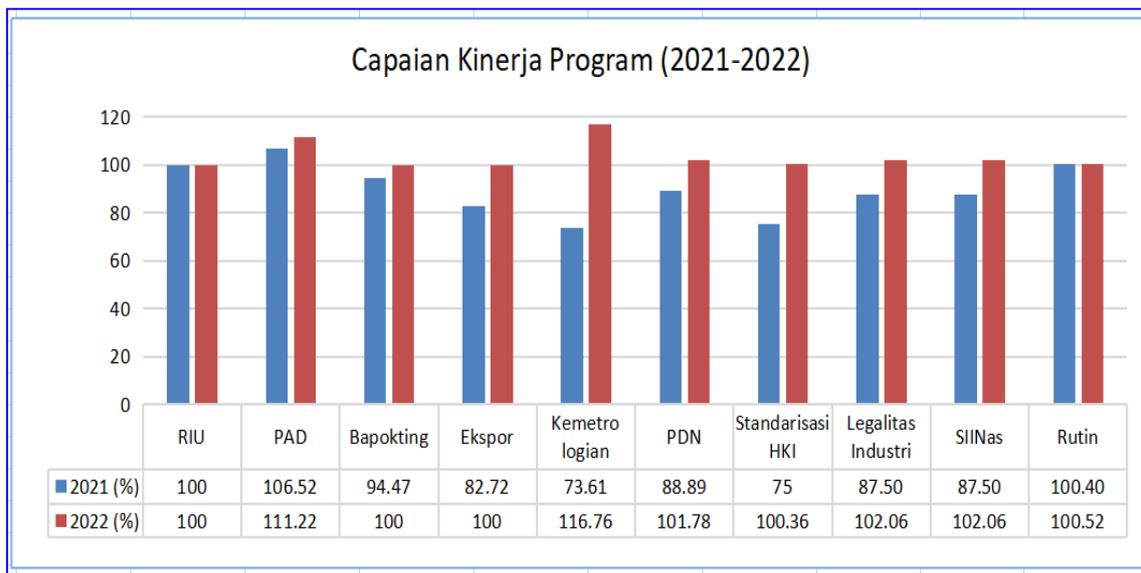
Jumlah komoditas bahan pokok dan barang penting yang diterkendali harga dan stoknya terealisasi sebagaimana jumlah target yaitu 3 komoditas sehingga tercapai 100%. Jumlah data harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilaporkan dalam sistem informasi dengan realisasi sebagaimana jumlah target yaitu 13 data sehingga terealisasi 100%. Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan dengan realisasi 6 kali dari target 4 kali sehingga tercapai 150%.

### **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi perdagangan terealisasi sebagaimana jumlah target yaitu 175 pelaku usaha sehingga tercapai 100%. Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi perdagangan terealisasi sebagaimana jumlah target yaitu 50 pelaku usaha sehingga tercapai 100%. Jumlah pelaku usaha pembinaan jaringan informasi perdagangan terealisasi sebagaimana jumlah target yaitu 125 pelaku usaha sehingga tercapai 100%.

### **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Jumlah sarana industri yang difasilitasi terealisasi sebagaimana jumlah target yaitu 2 unit sehingga tercapai 100%. Jumlah produk yang terfasilitasi pengurusan HaKI Cipta dengan realisasi sebagaimana jumlah target yaitu 20 unit sehingga tercapai 100%. Jumlah produk yang terfasilitasi pengurusan Uji Nutrisi terealisasi sebagaimana jumlah target yaitu 10 unit sehingga tercapai 100%. Jumlah IKM yang terfasilitasi sertifikasi Halal terealisasi sebagaimana jumlah target yaitu 10 unit sehingga tercapai 100%.



*Sumber : Disdagrin Kabupaten Jombang, Januari 2022*

Pelayanan di sektor perdagangan diupayakan melalui peningkatan ekspor perdagangan kegiatan promosi melalui pameran produk, yaitu memfasilitasi para pelaku usaha dalam memasarkan produk mereka sebagai indikator Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan dan Meningkatnya Pertumbuhan IKM. Perkembangan sektor perdagangan didominasi para pelaku usaha dari kalangan pengusaha kecil disamping keberadaan para pedagang informal termasuk pedagang kaki lima hal ini mendukung indikator kinerja persentase kelompok usaha yang berorientasi ekspor. Demikian juga kegiatan pengawasan barang dan jasa dilakukan pada pasar daerah guna menekan perkembangan harga bahan pokok dan barang penting lainnya, sehingga kebutuhan masyarakat terlayani secara wajar dengan harga wajar. Di sektor sarana prasarana perdagangan yaitu pengelolaan pasar daerah, pendapatan selalu diupayakan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan, karena hal ini berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan memperkuat posisi keuangan daerah, dan sekarang mulai melakukan terobosan baru melakukan e-retribusi yang bekerjasama dengan Bank Daerah. Disamping itu sarana dan prasarana pasar yang belum memadai diupayakan untuk selalu diperbaiki diantaranya melalui pembinaan pengelola (SDM) pasar, pemeliharaan dan rehabilitasi pasar daerah, hal ini mendukung indikator kinerja presentase realisasi PAD sektor pasar daerah. Pada bidang kemetrolgian dilakukan pelayanan tera dan tera ulang, pengawasan satuan ukuran, pengawasan BDKT, serta kalibrasi alat standar ukur, hal ini mendukung indikator kinerja persentase alat UTP yang sesuai standar.

Pelayanan di sektor perindustrian lebih banyak kepada pelatihan, pendampingan dan fasilitasi terhadap IKM dalam pengembangan usaha. Pelatihan yang dilakukan mencakup pelatihan proses produksi, desain dan kemasan, motivasi, manajemen usaha, peningkatan keterampilan, serta peningkatan teknologi. Untuk fasilitasi yang diberikan antara lain fasilitasi kerjasama kemitraan, hak merk/sertifikasi halal, fasilitasi

pengembangan teknologi, serta desain dan kemasan, hal ini mendukung indikator kinerja produktivitas tenaga kerja industri, persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah, dan persentase pengawasan industri dalam SIINas.

Capaian IKD yang diampu Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama Tahun 2022 sebagai berikut :

No	IKD	Satuan	capaian		
			Target	Realisasi	(%)
1.	Peningkatan omzet penjualan pelaku usaha	persen	20	21,12	105,60
2.	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	toko swalayan yang berijin	29	31	106,90
3.	Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	persen	14,29	14,29	100
4.	Jumlah komoditas yang mengalami fluktuasi	jenis	2	2	100
5.	Jumlah penyaluran jenis pupuk bersubsidi	jenis	5	5	100
6.	Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan terulang di wilayah kabupaten/kota	unit	15.603	17.021	109,09
7.	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan formal dan informal	orang	64.351		
8.	Persentase pertumbuhan PDB sektor industri pengolahan non migas	persen	3,54		
9.	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB	persen	20,86		

Capaian IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama Tahun 2022 sebagai berikut :

No	IKU	Satuan	capaian		
			Target	Realisasi	(%)
1.	Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan	persen	20	21,12	105,60
2.	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	persen	0.73	0.74	100,86
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah	BB	76	74,37	97,86

Berdasarkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dapat dijelaskan bahwa rasio antara anggaran dan realisasi tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dikatakan dapat mencapai sasaran (berhasil). Hal ini menandakan bahwa apa yang direncanakan dalam program/kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dilaksanakan sesuai target dan mencapai sasaran. Faktor-faktor yang menunjang kinerja anggaran dan pendanaan pelayanan yang baik diantaranya pemenuhan sarana dan prasarana perdagangan dalam hal ini pemeliharaan pasar daerah yang dilakukan setiap tahun guna pemenuhan sarana dan prasarana pasar daerah yang memadai dan representatif sehingga dapat meningkatkan kenyamanan bagi para pengguna pasar. Peningkatan produktivitas dan fasilitasi pemasaran produk bagi para pelaku usaha perdagangan dan industri (UKM/IKM). Namun sebenarnya masih ada permasalahan-permasalahan yang perlu diperhatikan agar realisasi pendanaan dan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk tahun berikutnya dapat

mencapai sasaran yaitu kurangnya jumlah personil (sumber daya manusia) yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan perindustrian sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan kadang kurang bisa berjalan dengan maksimal. Diantaranya untuk sumber daya manusia di sektor kemetrolgion yaitu kurangnya Petugas Pengawas Kemetrolgion yang memiliki kapabilitas, sedangkan kebutuhan akan pelayanan tera dan tera ulang harus mencakup seluruh wilayah Kabupaten Jombang demikian juga tenaga penyuluh perindustrian dan perdagangan yang hanya satu orang. Namun hal ini tidak menghalangi Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk terus melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan target/ rencana yang telah ditentukan.

Dalam mendukung program RPJMD Kabupaten Jombang dengan Tema Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yaitu **“Mewujudkan Jombang Unggul dan Berbudaya Berbasis Agribisnis”**. Dinas Perdagangan dan Perindustrian mewujudkannya melalui kebijakan Revitalisasi Pasar, Pengembangan hasil-hasil produk unggulan daerah, dan Pengembangan Infrastruktur pendukung kawasan industri, dengan indikator sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan. Sehingga peran aktif pedagang pasar daerah, pelaku usaha informal (PKL), pelaku usaha perdagangan dan industri (UKM/IKM) yang dibina merupakan penggerak roda keberhasilan Dinas Perdagangan Perindustrian terlebih untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang lebih maju, inovatif, produktif dan berdaya saing.

#### 4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan perangkat daerah merupakan mitra Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah dalam bentuk Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang memiliki tim/mitra/stakeholder guna mewujudkan tujuan dan sasaran baik program dan kegiatan PD. Guna meningkatkan pelayanan disektor perdagangan dan perindustrian di wilayah Kabupaten Jombang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkontribusi dengan stakholder sbagai berikut :

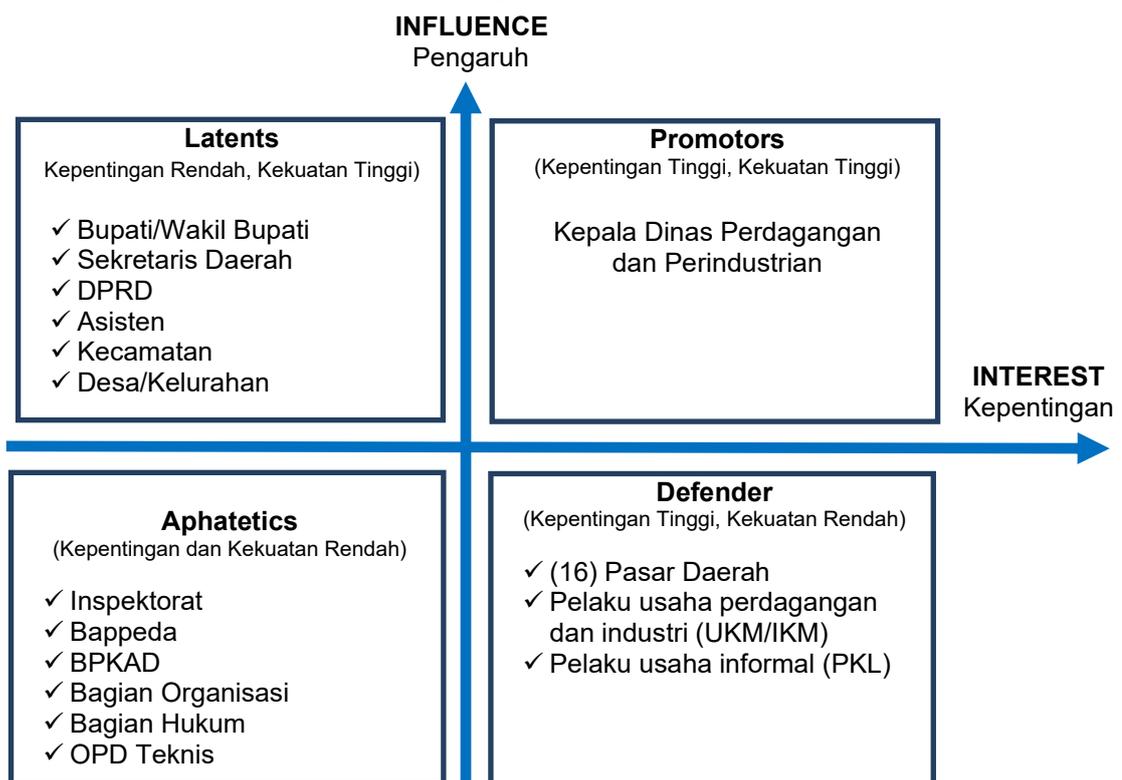
Stakeholder	Hubungan
1. Kementerian Perdagangan	Koordinasi dalam penyusunan rencana strategis dan isu-isu strategis yang berkesinambungan dengan OPD
2. Kementerian Perindustrian	
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur	
4. Bappeda Kabupaten Jombang	Koordinasi dalam penyusunan rencana strategis OPD, rencana kerja OPD, kebutuhan pendanaan program kegiatan OPD dan kebijakan organisasi OPD
5. Inspektorat	
6. BPKAD	
7. Bagian Organisasi	
8. Badan Pendapatan Daerah	Linked PAD pasar daerah dan kemetrolgion
9. Dinas Perhubungan	- Pengelola layanan retribusi parkir di luar wilayah pasar daerah - Pengelola layanan lalu lintas jalan kawasan pasar daerah

Stakeholder	Hubungan
10. Dinas Lingkungan Hidup	- Pengelola layanan kebersihan sampah akhir di pasar daerah - Pemantauan limbah berbahaya
11. Dinas PUPR	Pengelola teknis pembangunan fisik (slag alumunium, pembangunan/revitalisasi pasar, pembangunan sarana PKL)
12. Dinas Perkim	Pengelola teknis dibidang perumahan dan permukiman irisan pada pembangunan fisik (slag alumunium, pembangunan/ revitalisasi pasar, pembangunan sarana PKL)
13. Satpol PP	Pengelola teknis dibidang kedisiplinan ketertiban keamanan di wilayah pasar daerah, kawasan PKL
14. Masyarakat (pedagang pasar, pelaku usaha formal, pelaku usaha non formal)	Pengguna aplikasi layanan publik program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian menggunakan tiga jenis stakeholder yang dilaksanakan adalah:

- Stakeholder kunci, yaitu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang.
- Stakeholder Primer, yaitu Pasar Daerah, pelaku usaha perdagangan dan industri (UKM/IKM), pelaku usaha informal (PKL), dan OPD terkait (Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Satpol PP, Bapenda).
- Stakeholder Sekunder, yaitu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, DPRD, Asisten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.

Sebagaimana digambarkan dalam bagan dibawah ini :



Gambar 1 : Analisis Kelompok Stakeholder Dalam Pencapaian Kinerja Disdagrin

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perumusan permasalahan dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan tujuan dan sasaran strategis Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang selanjutnya dijabarkan tujuan dan sasaran Dinas. Isu strategis merupakan kristalisasi dari permasalahan kinerja Dinas, yang bersumber dari analisis data kondisi terkini, dan telaah terhadap isu strategis regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen Renstra karena menjadi pijakan dalam perumusan tujuan, sasaran dan program prioritas.

#### 1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan antara kinerja tujuan, sasaran dan program yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Selain itu juga diidentifikasi berdasarkan hasil evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi, kinerja pelayanan dan hasil evaluasi kegiatan Dinas. Adapun pemetaan permasalahan berdasarkan penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, yakni :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum meratanya penerapan teknologi dan belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk	1. Kualitas SDM	- Tingkat kualitas SDM
			- Keterbatasan SDM dalam penguasaan teknologi tepat guna
			- SDM kemetrolagian belum memenuhi standart
			- Arah kebijakan pelaku usaha perdagangan dan industri
		2. Produktivitas dalam pengembangan usaha	- Belum optimal dalam <i>update</i> data pelaku usaha UKM dan IKM
			- Lokasi yang kurang strategis
			- Tingkat kualitas produk pelaku usaha UKM/IKM
			- Kurangnya modal usaha pelaku usaha UKM/IKM
- Pelaku usaha UKM/IKM tidak prosedural dalam menjalani bisnisnya			

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.	Peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat	1. Eksistensi dan pemasaran produk unggulan Kabupaten Jombang masih perlu ditingkatkan	- Belum optimalnya jaringan pemasaran terkait produk - produk unggulan Kabupaten Jombang di level lokal, regional maupun nasional
			- Sarana Perdagangan belum memadai (usia bangunan pasar sudah tua, prasarana belum tercukupi)
			- Penataan PKL
			- Belum optimalnya akses pelaku usaha terhadap peluang pasar, khususnya pangsa ekspor
			- Perlu peningkatan kapasitas dari pelaku usaha UKM/IKM supaya lebih mempunyai daya saing
		- Belum optimal respon dari pelaku usaha terhadap pengembangan usaha pada platform digital	
		2. Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan berpotensi ekspor	- Kurang memadainya produk-produk pelaku usaha UKM/IKM untuk ekspor
			- Belum optimalnya akses pelaku usaha terhadap peluang ekspor
- Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan berpotensi ekspor			
- Kualitas bahan baku lokal yang belum memenuhi standar industri			
3.	Peningkatan peran pemerintah Daerah Kabupaten Jombang sebagai penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta Internasional	1. Keterbatasan kewenangan daerah	- Database sektor perdagangan dan perindustrian yang belum optimal
			- Belum optimalnya ketersediaan terminal angkutan barang
		2. Prediksi gejala harga dan aksi tanggap secara proporsional	- Jumlah dan kompetensi Aparatur yang kurang memadai dalam mengantisipasi isu-isu perdagangan
			- Kurangnya informasi terkait produsen komoditas untuk pemenuhan bahan pokok
			- Perlu upaya optimalisasi menjaga stabilitas harga di Kabupaten Jombang
			- Fluktuasi harga pangan yang tidak dapat diprediksi
4.	Adanya perubahan paradigma dalam hal legalitas usaha	Perubahan peraturan perundang-undangan terkait pelayanan perizinan	- Kebijakan pemberian kemudahan berusaha dari Pemerintah Daerah perlu adanya peningkatan upaya pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha
			- Perlu adanya keselarasan regulasi yang berlaku di Kabupaten Jombang dengan instansi vertikal
			- Perlu optimalisasi pelayanan tera/tera ulang terkait peningkatan kapasitas layanan, sarana prasarana, dan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian

Penentuan isu – isu strategis Perangkat Daerah dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi, kinerja pelayanan dan hasil evaluasi kegiatan Dinas serta tantangan eksternal baik dari lokal/bersifat kedaerahan maupun nasional bahkan internasional, mengingat Kabupaten Jombang merupakan salah satu kota jasa dan perdagangan. Analisis isu-isu strategis dapat berupa informasi - informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian juga dengan faktor internal dan eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi. Isu strategis merupakan kondisi/keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan demografi, ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
			(Kewenangan PD)	(Diluar Kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil Analisis Gambaran Pelayanan PD	Belum optimalnya pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP Toko Swalayan)	IKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Himbauan pada pelaku usaha dalam keaktifan pelaporan</li> <li>- Pemantauan pada pelaku usaha dalam memberikan rekomendasi ijin usaha (IUTS, IUTM, TDG)</li> </ul>	Belum tegasnya penegakan peraturan yang mengikat pada pelaku usaha yang tidak melakukan ijin usaha	Terbatasnya tingkat kewenangan PD dalam perihal perizinan yang hanya melakukan rekomendasi ijin usaha
	Meningkat nya potensi melakukan tera pada alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda berlaku	IKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan kemetrolgian pada pelaku usaha dalam tera/ tera ulang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)</li> <li>- Pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kesadaran wajib tera untuk menera alat UTTPnya</li> <li>- Luasnya wilayah dan banyaknya obyek pengawasan yang tidak sebanding dengan SDM (tenaga ahli pengawasan metrologi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih terbatasnya jumlah tenaga ahli dibidang kemetrolgian</li> <li>- Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan metrologi legal</li> </ul>

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
			(Kewenangan PD)	(Diluar Kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			sebagaimana ketentuan yang berlaku	yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang	
	Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna pasar untuk saling menjaga sarana dan prasarana		Pelaksanaan revitalisasi dan rehab pasar daerah	Pemerintah Pusat/ Kementerian memfasilitasi melalui dana DAK, BK, dan TP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna pasar untuk saling menjaga sarana dan prasarana</li> <li>- Belum tertibnya pembayaran retribusi oleh pedagang</li> </ul>
	Upaya optimalisasi menjaga stabilitas harga di Kabupaten Jombang		Jumlah dan kompetensi Aparatur yang kurang memadai dalam mengantisipasi isu-isu perdagangan	Fluktuasi harga pangan yang tidak dapat diprediksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya informasi terkait produsen komoditas untuk pemenuhan bahan pokok</li> <li>- Rantai distribusi bapokting yang panjang</li> </ul>
	Kemudahan dalam Pelayanan perizinan berbasis elektronik		Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung kemudahan perizinan (dalam bentuk pelayanan pemberian rekomendasi ijin usaha)		

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
			(Kewenangan PD)	(Diluar Kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tingkat penyelesaian dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	IKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersusun Naskah Akademik RPIK Tahun 2019</li> <li>- Tersusun Draft Raperda RPIK Tahun 2019</li> <li>- Proses permohonan rekomendasi ke Provinsi tetapi masih ada beberapa revisi yang membutuhkan perbaikan didukung dengan berita acara evaluasi teknis RAPERDA Rencana Pembanguna Industri Kabupaten Jombang Tahun 2020 – 2040</li> </ul>		Penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK
	Izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	IKK	Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	Izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Masih terbatasnya jumlah tenaga ahli dibidang perindustrian
Hasil Analisis Renstra K/L dan Renstra Provinsi	Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan ekspor non migas</li> <li>- Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non -migas terhadap ekspor nasional</li> <li>- Persentase kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non migas Jawa Timur</li> </ul>	Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor	

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
			(Kewenangan PD)	(Diluar Kewenangan PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan</li> <li>Resi Gudang dan Pertumbuhan nilai transaksi di pasar lelang</li> <li>Persentase pertumbuhan perdagangan antar wilayah/antar pulau antar propinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi/ penguatan Pasar Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang (SRG) dan pasar lelang</li> <li>Pengintegrasian dan perluasan Pasar Dalam Negeri</li> </ul>	
	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok		<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya kewenangan dalam mewujudkan stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arah kebijakan stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok</li> </ul>	
	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda terasah yang berlaku</li> <li>- Pertumbuhan kalibrasi, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Perlindungan Konsumen</li> <li>Meningkatnya penguatan kelembagaan pengujian dan sertifikasi mutu barang, kemetrologian serta pengawasan perdagangan barang dan jasa ilegal</li> </ul>	
	Meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Desain produk industri, SDM IKM terlatih bidang kemasan, Perubahan bersistem mutu (ISO, HACCP, GMP), Permodalan bagi IKM		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan sertifikasi mutu komoditi/produk</li> <li>- Meningkatnya standardisasi produk industri manufaktur sebagai faktor penguat daya saing</li> </ul>		

Tabel 3.3  
 ANALISIS SWOT  
 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan ( <i>Strength</i> ) - S	Kelemahan ( <i>Weakness</i> ) - W
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan Pelaku Usaha UKM/IKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas dan kuantitas SDM pengawasan dan pembinaan pelaku usaha UKM/IKM berkompetensi dibidangnya</li> <li>- Kurangnya Petugas Pengawas Kemetrolgion yang memiliki kapabilitas</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung kegiatan Perdagangan dan Perindustrian antara lain eR-Pas (elektronik retribusi pasar), Simoleg (Sistem Informasi Metrologi Legal), Saudagar (Sistem Administrasi Usaha dan Pengendalian Harga Pasar) serta SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) untuk mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedianya data demografi tentang pelaku usaha perdagangan (PKL, Pasar, UKM/IKM) di Kabupaten Jombang</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhatian dan dukungan Pemerintah dalam penyediaan fasilitas tempat berusaha bagi pelaku usaha, Pasar dan Sentra UKM/IKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi dan aksesibilitas fasilitas tempat berusaha bagi pelaku usaha (PKL, Pasar dan Sentra UKM/IKM) yang kurang strategis dan sarana prasarana pendukung yang belum optimal</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan Dasar Hukum, Standar Operasional Prosedur (SOP), Peraturan dan Pedoman tentang Perdagangan dan Perindustrian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas produk IKM yang belum optimal untuk bersaing dengan produk usaha lainnya</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi yang baik dengan instansi vertikal maupun horizontal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya kewenangan Dinas terhadap indikator dan target yang berkaitan dengan tingkat ketersediaan barang pokok dan penting lainnya</li> </ul>

<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>	
<b>Peluang (<i>Opportunities</i>) - O</b>	<b>Ancaman (<i>Threats</i>) - T</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posisi Strategis Kabupaten Jombang sebagai Kabupaten Penghubung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinamika perkembangan perdagangan global dan aspek legalitas yang mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum</li> <li>- Sudah banyaknya berdiri yayasan lembaga perlindungan konsumen yang ada di Kabupaten Jombang;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan dan pelaku usaha industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya persaingan antar para pelaku usaha baik sesama pelaku usaha mikro maupun dengan pelaku usaha kecil, menengah dan besar</li> <li>- Para pelaku IKM kurang dapat atau terhambat mengimbangi kemajuan teknologi yang semakin bertambah maju di era globalisasi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingginya perhatian pemerintah dan animo masyarakat untuk pengembangan produktifitas usaha dan industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan dan persebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) pada lokasi – lokasi fasilitas umum dan ruang publik</li> <li>- Kurangnya kepedulian masyarakat pengguna pasar daerah mengakibatkan kurang terjaganya kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar daerah</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Muncul dan tumbuhnya usaha kreatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya produk impor dengan harga yang lebih murah yang dapat mengganggu produktivitas dan pemasaran produk usaha UKM/IKM</li> <li>- Adanya pemberlakuan FTA (Free Trade Agent) yang megancam keberlangsungan produk dalam negeri</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peluang pertumbuhan pangsa pasar bagi kegiatan UKM/IKM ditingkat regional, nasional dan internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beredarnya produk impor yang belum memiliki standar dan mulai berdirinya minimarket waralaba yang dimiliki perorangan/swasta</li> <li>- Adanya peningkatan penerapan NTBs (Non Tarif Barriers) di negara-negara tujuan ekspor guna melindungi produk mereka</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama dan dukungan stakeholder eksternal kepada pelaku usaha UKM/IKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem informasi dan fluktuasi harga barang pokok dan penting lainnya</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan daya saing dan semangat kewirausahaan pelaku usaha UKM/IKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan akses permodalan pelaku usaha UKM/IKM</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemajuan teknologi internet bagi jangkauan pemasaran dan promosi perdagangan (online) seiring dengan perkembangan platform ekonomi digital yang masif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinkronisasi dan Integrasi data perizinan dengan Pusat</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan infrastruktur jalan secara pesat memiliki dampak ekonomi besar, antara lain dalam peningkatan perdagangan dan pergudangan serta peningkatan ekonomi kreatif dan pengembangan usaha UKM/IKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran pelaku usaha untuk tertib serta kepatuhan terhadap peraturan</li> </ul>

## 2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang selaras dengan tujuan Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Sejahtera, adil dan makmur menggambarkan tentang pemerataan pembangunan diseluruh Kabupaten Jombang. Dimana sekarang ini Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024 yaitu **“Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Industri Agribisnis dan Pembangunan Wilayah”**. Dari sisi kemandirian dan kesejahteraan, tidak hanya bisa dilihat dari kemampuan menghidupi diri sendiri dan kemampuan batiniah dan lahiriah (ekonomi). Ini semua dikarenakan masuknya era globalisasi yang bermakna persaingan sudah tidak lagi melibatkan sumber daya internal (lokal), tetapi sudah melibatkan sumber daya eksternal.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendukung Tema Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yaitu **“Mewujudkan Jombang Unggul dan Berbudaya Berbasis Agribisnis”**. Melalui kebijakan Revitalisasi Pasar, Pengembangan hasil-hasil produk unggulan daerah, dan Pengembangan Infrastruktur pendukung kawasan industri, dengan indikator sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan.

Dalam rangka menganalisis perkembangan situasi dan kondisi Dinas Perdagangan dan Perindustrian beberapa tahun ke depan, maka perlu dirumuskan isu-isu strategis yang sebagaimana permasalahan berdasarkan urusan perdagangan dan urusan perindustrian. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun rencana.

Hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan urusan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel 3.4. dibawah ini :

Tabel 3.4

TABULASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RENSTRA TAHUN 2024-2026  
 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang

DESKRIPSI PERMASALAHAN BERDASAR URUSAN	ISU STRATEGIS
<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu peningkatan kapasitas dari pelaku usaha supaya lebih mempunyai daya saing</li> <li>- Belum optimalnya akses pelaku usaha terhadap peluang ekspor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pengembangan informasi peluang pasar dan jaringan pemasaran</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu upaya optimalisasi menjaga stabilitas harga</li> <li>- Fluktuasi harga pangan yang tidak dapat diprediksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme pengendalian distribusi barang dan stabilitas ketersediaan barang pokok dan penting</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting fluktuatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kegiatan operasi pasar</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi</li> <li>- Adanya peraturan yang berbeda antara Peraturan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat beberapa gudang untuk kegiatan usaha tetapi belum mempunyai legalitas perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih banyak gudang industri yang belum memiliki legalitas (TDG)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu optimisasi pelayanan tera/tera ulang terkait peningkatan kapasitas layanan, sarana prasarana, dan Sumber Daya Manusia Kemetropolitan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi pelayanan tera/tera ulang dalam rangka upaya perlindungan konsumen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan pemberian kemudahan berusaha dari Pemerintah Pusat memerlukan adanya peningkatan upaya pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha</li> <li>- Perlu adanya keselarasan regulasi yang berlaku di pemerintah daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang perdagangan</li> </ul>

DESKRIPSI PERMASALAHAN BERDASAR URUSAN	ISU STRATEGIS
<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>	
- UU no. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja	- Pengawasan produk yang beredar (mutu dan legalitas)
- Industri kecil dan menengah masih belum banyak melakukan diverifikasi produk	- Belum optimalnya intensitas kegiatan pendampingan dengan IKM dengan melibatkan tenaga ahli dibidang
- Masih banyak produk IKM yang belum terstandarisasi	- Peningkatkan IKM yang mendapatkan legalitas
- Sektor industri masih belum mampu memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal untuk substitusi bahan baku impor (didatangkan dari daerah /negara lain) akibatnya biaya produksi menjadi relatif lebih tinggi	- Belum maksimalnya pemanfaatan bahan lokal dalam berproduksi
- Industri kreatif belum dapat berkontribusi secara maksimal terhadap daya saing industri daerah	- Belum maksimalnya kontribusi industri kreatif
- Terbentuknya kawasan industri dan kawasan peruntukan industri industri harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai	- Sarana prasarana kawasan industri
- Industri kecil menengah masih belum maksimal dalam mengakses teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produksi	- Belum merapatnya penerapan teknologi dan belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk
- Produktivitas industri kecil dan menengah menjadi menurun	- Adanya kenaikan inflasi dampak dari kenaikan harga BBM terhadap produktivitas IKM

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan.

### 1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD/Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026

Adapun tema Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah **Mewujudkan Jombang Unggul dan Berbudaya Berbasis Agribisnis**. Dalam mendukung tema pembangunan RKPD Tahun 2024-2026 yaitu Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul, dengan tujuan Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agribisnis dan sektor unggul lainnya. Dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang **melaksanakan tema pembangunan ke-3 yaitu** : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Peningkatan Investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan dalam kegiatan strategis daerah yaitu Pembangunan Lanjutan Pasar. Dalam mendukung tema tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan pencapaian tujuan secara khusus yang akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan yang juga menjadi indikator kinerja utama, yaitu:

1. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah dengan indikator nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah, pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 79,02 (BB) menjadi sebesar 79,06 (BB) pada tahun 2026;
2. Pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan, pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 20,5% menjadi sebesar 20,8% pada tahun 2026;
3. Produktivitas IKM dengan indikator (1) prosentase pertumbuhan pelaku usaha IKM pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 81% menjadi sebesar 81,4% pada tahun 2026; (2) Prosentase produk yang sudah terstandarisasi dan HKI, pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 71% menjadi sebesar 71,6% pada tahun 2026; (3) Produktivitas tenaga kerja industri, pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 71% menjadi sebesar 71,6% pada tahun 2026.

### 2. Cascading Kinerja PD mulai dari Tujuan, Sasaran, outcome, dan Output serta indikatornya masing-masing

Adapun tujuan dan sasaran restra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 : Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2024-2026  
Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			
							Satuan	2024	2025	2026
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah</b>					Persen	79,02	79,04	79,06
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur</b>	Persen	100	100	100
					<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Dokumen	8	7	8
					Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	2	3
					Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	5
					<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</b>	Persen	100	100	100
					Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	67	67	67
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			
							Satuan	2024	2025	2026
					Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1
					Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD	Laporan	16	16	16
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Laporan	1	1	1
					Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	1	1
					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	1	1	1
					Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	4
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Laporan	7	7	7
					Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	30	30	30

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			
							Satuan	2024	2025	2026
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	67	67	67
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	7	7
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	5
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	17	17	17
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	2
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	27	27	27
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Unit			
					Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan penunjang kantor urusan pemerintah daerah	Laporan	2	2	2
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	3

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			
							Satuan	2024	2025	2026
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	2
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik	Unit	139	139	139
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	46	46	46
					Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2	2
					Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	90	90	90

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			
							Satuan	2024	2025	2026
	<b>Pertumbuhan ekonomi Daerah</b>	<b>Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan</b>					<b>Persen</b>			
2.	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi Daerah	Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan	<b>Program perijinan dan pendaftaran perusahaan</b>	<b>Persentase penerbitan rekomendasi perijinan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
					Kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	Jumlah izin usaha perdagangan yang diterbitkan	Dokumen	4	4	4
					Sub kegiatan Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha secara elektronik	Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Dokumen	4	4	4
					Kegiatan penerbitan tanda daftar gudang	Jumlah rekomendasi izin usaha tanda daftar gudang TDG yang diterbitkan	Dokumen	4	4	4
					Sub kegiatan Fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang	Jumlah dokumen tanda daftar gudang	Dokumen	4	4	4
					Kegiatan Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah rekomendasi izin usaha surat tanda pendaftaran waralaba STPW yang diterbitkan	Dokumen	4	4	4
					Sub kegiatan Fasilitasi perizinan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba STPW dalam negeri terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen perizinan surat tanda pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba STPW dalam negeri terintegrasi elektronik	Dokumen	4	4	4

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
							Satuan	2023	2024	2025	2026
					<b>Program peningkatan sarana distribusi perdagangan</b>	<b>Presentase realisasi PAD sektor pasar daerah</b>	Persen	100	100	100	100
					Kegiatan pembangunan dan pengolahan sarana distribusi perdagangan	Tingkat pembangunan dan pengolahan sarana distribusi perdagangan yang dickyupi					
					Sub kegiatan penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Unit	5	5	5	5
					Sub kegiatan fasilitasi pengolahan sarana distribusi perdagangan	Jumlah fasilitasi pengolahan sarana distribusi perdagangan	Unit	16	16	16	16
					Kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Tingkat kepuasan kinerja personalia pengelola pasar daerah terhadap pedagang pasar	Persen	77	77	77	77
					Sub kegiatan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	Dokumen	4	4	4	4
					Sub kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdangan	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan		1	1	1	1

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			
							Satuan	2024	2025	2026
					<b>Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	<b>Presentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil</b>	<b>Persen</b>	<b>14,29</b>	<b>14,29</b>	<b>14,29</b>
					Kegiatan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat daerah kota/ kabupaten	Jumlah hasil monitoring ketersediaan bapokting yang ditindak lanjuti	Laporan	14	14	14
					Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen/pasar rakyat	Laporan	2	2	2
					Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar	Jumlah laporan pengendalian stok atau ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Laporan	12	12	12
					Kegiatan pengendalian harga, dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kab/kota	Jumlah komoditas bapokting yang terkendali	Laporan	3	3	3
					Sub kegiatan pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dn barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah laporan pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Laporan	12	12	12

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			
							Satuan	2024	2025	2026
					Sub kegiatan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 kab/kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 kab/kota	Laporan	2	2	2
					Kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pengawasan penyaluran yang ditindaklanjuti		12	12	12
					Sub kegiatan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	Laporan	12	12	12
					<b>Program pengembangan ekspor</b>	<b>Presentase peningkatan ekspor pelaku usaha yang terfasilitasi</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
					Kegiatan penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1satu daerah kabupaten/ kota	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi dan misi dagang	Pelaku usaha	401	401	401
					Sub kegiatan pembinaan dn pengembangan usaha produk ekspor unggulan kab/kota	Jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang dibina	Pelaku usaha	20	20	20
					Sub kegiatan pameran dagang nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	Pelaku usaha	32	32	32
					Sub kegiatan pameran dagang lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran lokal	Pelaku usaha	345	345	345
					Sub kegiatan misi dagang bagi produk ekspor unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	Pelaku usaha	4	4	4

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			
							Satuan	2024	2025	2026
					<b>Program standarisasi dan perlindungan konsumen</b>	<b>Presentase alat UTTP yang sesuai standar</b>	<b>Persen</b>			
					Kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang dan pengawasan	Tingkat kepuasan pengguna layanan kemetroligin		77	77	77
					Sub kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan perlengkapan ditera ulang	Unit	6000	6000	6000
					Sub kegiatan pengawasan/ penyuluhan metrologi legal	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina	Orang	12	12	12
					<b>Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri</b>	<b>Prosentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
					Kegiatan pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi perdagangan	Pelaku usaha			
					Sub kegiatan pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri ditingkat kab/kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	50	50	50
					Sub kegiatan peningkatan sistem dan jaringan informasi	Jumlah data dan informasi sistem dan jaringan informasi perdagangan		130	130	130

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			
							Satuan	2024	2025	2026
3	Meningkatnya nilai tambah produk perdagangan dan industri kecil dan menengah	Produktivitas IKM	Meningkatnya pertumbuhan IKM	Produktivitas tenaga kerja industri	<b>Program perencanaan dan pembangunan industri</b>	<b>Produktivitas tenaga kerja industri</b>	Rp/org	0,8	0,9	1
					Kegiatan penyusun dan evaluasi rencana pembangunan industri kab/kota	Jumlah monitoring hasil, koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan kegiatan	Dokumen	4	4	4
					Sub kegiatan koordianasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri	Dokumen	1	1	1
					Sub kegiatan koordiansi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Dokumen	1	1	1
					Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Dokumen	1	1	1
					Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdaya industri dan peran serta masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinsi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdaya industri dan peran serta masyarakat	Dokumen	1	1	1

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			
							Satuan	2024	2025	2026
				Prosentase produk yang sudah terstandarisasi dan HKI	<b>Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota</b>	<b>Persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
					Kegiatan penerbitan izin usaha industri(IUI), Izin perluasan usaha industri(IPUI), Izin usaha kawasan industri (IUKI) Dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) Kewenangan kab/kota	Jumlah rekomendasi izin usaha industri(IUI), Izin perluasan usaha industri(IPUI), Izin usaha kawasan industri (IUKI) Dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang diterbitkan	Dokumen	1	1	1
					Sub kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI,IPUI, IUKI Dan IPKI kewenangan kabupaten/kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian prsyarat teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan risiko dan tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS	Dokumen	1	1	1
						Jumlah izin usaha industri(IUI), Izin perluasan usaha industri (IPUI), Izin usaha kawasan industri (IUKI) Dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang diterbitkan	Dokumen			

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			
							Satuan	2024	2025	2026
					Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri dalam lingkup UI,IPUI, IUKI,Dan IPKI kewenangan kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan kabupten/kota	Dokumen	2	2	2
				Prosentase pertumbuhan pelaku usaha IKM	<b>Program pengelolaan sistem informasi industri nasional</b>	<b>Persentase pengawasan industri dalam SIINas</b>	Persen	100	100	100
					Kegiatan penyediaan informasi industri untuk UI,IPUI,IUKI Dan IPKI kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen informasi industri untuk UI,IPUI,IUKI, Dan IPKI kewenangan kabupaten	Dokumen	1	1	1
					Sub kegiatan fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisis data industri data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisis data industri data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)	Dokumen	1	1	1
					Sub kegiatan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri lingkup kabupaten/ kota dalam penyampaian SIINas	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan lingkup kabupaten kota dalam penyampaian data ke SIINas	Dokumen			



## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan.

Kebijakan adalah arah atau ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Pembangunan ekonomi dalam tiga tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

- 2024** : Meningkatkan daya dukung infrastruktur berkelanjutan yang mendorong industri agribisnis dan pembangunan wilayah.
- 2025** : Penguatan Daya Saing SDM dan Ekonomi Melalui Hilirisasi Agrobisnis.
- 2026** : Mewujudkan Integrasi Sektor Perdagangan dan Industri Agribisnis yang ditopang sektor unggulan lainnya.

Adapun keselarasan isu strategis dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dengan kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang melaksanakan dua urusan yaitu urusan perdagangan dan urusan perindustrian yang digambarkan sebagaimana tabel berikut :

	<b>Strategis</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Kementerian Perdagangan</b>	1) Mengamankan pangsa ekspor dipasar utama 2) Meningkatkan diversifikasi produk ekspor 3) Memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif	Pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor
	1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan 2) Meningkatkan koordinasi dan peran pemerintah daerah dalam kelancaran distribusi	Penguatan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok

	<b>Strategis</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan akurasi data harga barang kebutuhan pokok</li> <li>2) Meningkatkan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok</li> <li>3) Mengoptimalkan pengelolaan impor barang kebutuhan pokok</li> </ol>	Pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan edukasi konsumen</li> <li>2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen</li> </ol>	Peningkatan pemberdayaan konsumen
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri</li> <li>2) Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas K/L dan daerah dalam mendukung implementasi sistem logistik nasional yang efektif dan efisien</li> </ol>	Pembinaan dan penanganan pasar dalam negeri
<b>Kementerian Perindustrian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas</li> <li>2) Penguatan implementasi making Indonesia 4.0</li> <li>3) Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri</li> </ol>	Pengembangan sumber daya industri
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan standardisasi industri</li> <li>2) Pengembangan infrastruktur industri</li> <li>3) Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</li> </ol>	Pengembangan sarana dan prasarana industri
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan industri kecil dan menengah</li> <li>2) Pengembangan industri hijau</li> <li>3) Pengembangan industri strategis</li> <li>4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)</li> <li>5) Kerjasama internasional di bidang industri</li> </ol>	Pemberdayaan industri
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)</li> <li>2) Kawasan Peruntukan Industri (KPI)</li> <li>3) Kawasan Industri (KI)</li> <li>4) Pembangunan atau revitalisasi sentra IKM</li> </ol>	Pengembangan perwilayahan industri
		<b>Urusan Perindustrian</b>
<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan produktivitas industri agro</li> </ol>	1) Meningkatkan produktivitas industri agro Jawa Timur
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Peningkatan produktivitas industri non-agro</li> </ol>	2) Meningkatkan produktivitas industri non-agro Jawa Timur
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3) Peningkatan kebijakan industri dan perdagangan</li> </ol>	3) Optimalisasi struktur industri dan perdagangan
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4) Peningkatan teknologi industri dan standarisasi</li> </ol>	4) Meningkatkan teknologi industri dan standarisasi di Jawa timur

	<b>Strategis</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	<p><u>Urusan Perdagangan</u></p> <p>1) Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor</p> <p>2) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</p> <p>3) Peningkatan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga</p> <p>4) Peningkatan pelayanan dibidang penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi</p>	<p>1) Meningkatkan Ekspor dan Pengendalian Impor</p> <p>2) Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri</p> <p>3) Meningkatkan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga</p> <p>4) Meningkatkan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi Jawa Timur</p>
Pemerintah Kabupaten Jombang	<p>1) Kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter</p> <p>2) Penguatan daya saing</p>	Meningkatkan daya dukung infrastruktur berkelanjutan yang mendorong industri agribisnis dan pembangunan wilayah
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang	<p><u>Urusan perdagangan</u></p> <p>1) Peningkatan efektivitas perencanaan dan pelaporan, Peningkatan efektivitas kinerja perangkat daerah.</p> <p>2) Melakukan operasi pasar; Pemantauan dan pelaporan harga; Pengawasan UTTP; Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang.</p> <p>3) Peningkatan sarpras perdagangan; Melakukan pendataan potensi pasar dan kemetrolgian.</p>	<p>1)Meningkatnya efektivitas penyusunan Renstra, Renja dan Lakip; Mengembangkan layanan prima dalam pelayanan publik.</p> <p>2)Melakukan operasi pasar sebagai respon atas terjadinya kenaikan harga/dan atau sebagai antisipasi potensi kenaikan harga; Menyusun database potensi UTTP dan memperbarui secara berkala; Peningkatan perlindungan konsumen, standarisasi UTTP dan pengamanan perdagangan.</p> <p>3)Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar daerah; Melakukan e-retribusi pasar.</p>
	<p><u>Urusan perindustrian :</u></p> <p>1)Peningkatan daya saing;</p> <p>2)Mendorong industri kecil dan menengah yang memiliki nilai ekspor dan bernilai tambah tinggi secara progresif</p>	<p>1) Peningkatan daya saing industri melalui peningkatan kemampuan teknologi industri, sumberdaya manusia industri, pengembangan inovasi dan standarisasi produk industri; Pengembangan industri kreatif.</p> <p>2) Mengembangkan akses informasi dan pemasaran luar negeri bagi IKM yang memiliki nilai ekspor tinggi dan nilai tambah tinggi.</p>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Proses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, maka penyajian program kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah (PD) disesuaikan sebagaimana RPJMD tahun 2024-2026.

#### **Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Berikut tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024-2026 yang berisi rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana indikator kinerja serta dana indikatif dengan target sasaran sebagai berikut dibawah ini:

Tabel 6.1 : Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Tahun 2024  
Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah					78 (BB)		78 (BB)		80 (A)		80 (A)		80 (A)	
				3.30.01.2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	%	100		100	12,432,778,808	100	13,878,067,780	100	15,043,883,588	100	41,162,501,188
				3.30.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai aturan	dokumen	7		8	15,189,650	8	16,708,615	8	18,379,477	24	50,277,742
				3.30.01.2.01.0001	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen			3	7,489,830	3	8,238,835	3	9,062,719	9	24,791,404
				3.30.01.2.01.0006	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan			5	7,699,800	5	8,469,780	5	9,316,798	15	25,486,338
				3.30.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	bulan	12		12	9,110,735,681	12	10,021,807,049	12	11,023,987,754	36	30,156,528,484
				3.30.01.2.02.0001	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang			66	8,768,859,831	66	9,645,745,814	66	10,610,320,396	198	29,024,926,041
				3.30.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen			12	338,874,000	12	372,761,400	12	410,037,540	36	1,121,672,940
				3.30.01.2.02.0005	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan			1	1,999,900	1	2,199,890	1	2,419,879	3	6,619,689
				3.30.01.2.02.0007	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	laporan			17	999,950	17	1,099,948	17	1,209,940	51	3,309,835

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				3.30.012.05.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	bulan	12	12	93,200,000	12	140,520,000	12	196,372,000	36	430,092,000	
				3.30.012.05.0002	Pengadaan Pakialan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakialan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket		233	93,200,000	233	162,520,000	233	112,772,000	659	308,492,000	
				3.30.012.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai/ berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai/ berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	org				20	38,000,000	20	41,800,000	40	79,800,000	
				3.30.012.06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	bulan		12	813,534,478	12	894,887,926	12	984,376,718	36	2,692,798,122	
				3.30.012.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket		27	36,532,200	27	40,185,420	27	44,203,962	81	120,921,582	
				3.30.012.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket		64	60,245,128	64	66,269,641	64	72,896,605	192	199,411,374	
				3.30.012.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket		9	6,997,300	9	7,697,030	9	8,466,733	27	23,161,063	
				3.30.012.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket		5	240,430,000	5	264,473,000	5	290,920,300	15	795,823,300	
				3.30.012.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket		17	300,729,850	17	330,802,895	17	363,883,119	51	995,415,804	
				3.30.012.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen		2	111,280,000	2	122,408,000	2	134,648,800	6	368,336,800	
				3.30.012.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan		25	57,320,000	25	63,052,000	25	69,357,200	75	189,729,200	
				3.30.012.03.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	unit	4	4	17,493,800	4	19,243,180	4	21,167,498	4	57,904,478	
				3.30.012.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan		4	17,493,800	4	19,243,180	4	21,167,498	12	57,904,478	
				3.30.012.07.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Renunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	unit	9	2	700,000,000	2	770,000,000	2	847,000,000	6	2,317,000,000	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				3.30.012.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit		1	500,000,000	1	550,000,000	1	605,000,000	1	1,655,000,000	
				3.30.012.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit		2	200,000,000	2	220,000,000	2	242,000,000	6	662,000,000	
				3.30.012.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan penunjang kantor urusan pemerintah daerah	bulan	12	12	1,024,908,200	12	1,126,733,520	12	1,239,406,872	36	3,390,448,592	
				3.30.012.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan		12	503,400,000	12	553,740,000	12	605,114,000	36	1,666,254,000	
				3.30.012.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan		12	520,903,200	12	572,993,520	12	630,292,872	36	1,724,189,592	
				3.30.012.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik	unit		129	658,325,000	129	724,157,000	129	796,573,250	129	2,179,055,750	
				3.30.012.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit		1	38,610,000	1	42,471,000	1	46,718,100	3	127,799,100	
				3.30.012.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		38 46	238,215,000	38 46	262,036,000	38 46	288,240,150	114 138	788,491,650	
				3.30.012.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit		1	240,000,000	1	264,000,000	1	290,400,000	3	794,400,000	
				3.30.012.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit		90	141,500,000	90	155,650,000	90	171,215,000	270	468,365,000	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi Daerah	Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan				%	20		21.12		21.32		21.62		21.72		
				3.30.02.2.	Program perijinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase penerbitan rekomendasi perijinan	%	100		100	77,490,350	100	86,239,276	100	93,783,208	300	268,482,728	
				3.30.02.2.01.	Kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan	Jumlah (jin usaha perdagangan yang diterbitkan	RIU			6	13,875,000	6	15,262,500	6	16,788,750	18	45,926,250	
				3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi secara elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen			6	13,875,000	6	15,262,500	6	16,788,750	18	45,926,250	
				3.30.02.2.02.	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah rekomendasi (jin usaha Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan	RIU			10	52,490,800	10	57,739,550	10	63,513,508	30	173,743,555	
				3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	dokumen			10	52,490,800	10	57,739,550	10	63,513,508	30	173,743,555	
				3.30.02.2.03.	Kegiatan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah rekomendasi (jin usaha Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang diterbitkan	RIU			4	11,124,750	4	12,237,225	4	13,460,948	12	36,822,923	
				3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen			4	11,124,750	4	12,237,225	4	13,460,948	12	36,822,923	
				3.30.03.2.	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah	%	110.84		100	21,424,678,088	100	23,687,083,897	100	26,823,737,088	100	70,816,348,861	
				3.30.03.2.01.	Kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang didukupi	pasar daerah				21,131,113,088		23,244,224,397		25,568,646,836		69,943,984,321	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	unit			18	17,928,442,200	18	19,721,286,420	18	21,693,415,062	54	59,343,143,682					
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit			16	3,202,670,888	16	3,522,937,977	16	3,875,231,774	48	10,600,840,639					

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal	2024		2025		2028		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2028		KETERANGAN
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				3.30.03.2.02.	Kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Tingkat kepuasan kinerja personalia pengelola pasar daerah terhadap pedagang pasar	%		77	293,463,000	77	322,809,300	77	355,090,230	231	971,362,530	
				3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen		12	132,420,000	12	145,662,000	12	160,228,200	36	438,310,200	
				3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen		4	161,043,000	4	177,147,300	4	194,862,030	12	533,052,330	
				3.30.04.2.	<b>Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	<b>Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil</b>	%	14.28	14.28	126,603,600	14.28	138,063,860	14.28	161,859,236	14.28	416,418,686	
				3.30.04.2.01.	Kegiatan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok, dan barang penting di tingkat daerah kab/kota	Jumlah hasil monitoring ketersediaan bapoling yang diindaklanjuti	laporan	12	12	17,438,500	12	19,182,350	12	21,100,585	36	57,721,435	
				3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	laporan		12	10,995,000	12	12,094,500	12	13,303,950	36	36,393,450	
				3.30.04.2.01.0003	Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	laporan		12	6,443,500	12	7,087,850	12	7,796,635	36	21,327,985	
				3.30.04.2.02.	Kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok, dan barang penting di tingkat pasar kab/kota	Jumlah komoditas bapoling yang terkendali	komoditas	3	3	82,075,000	3	90,282,500	3	99,310,750	9	271,668,250	
				3.30.04.2.02.0002	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	laporan		13	58,075,000	13	63,882,500	13	70,270,750	39	192,228,250	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				3.30.04.2.02.0003	Relaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kab/kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan			8	24,000,000	8	26,400,000	8	29,040,000	24	79,440,000	
				3.30.04.2.03.	Kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pengawasan, penyaluran yang dilakukan (UE)	laporan	12		12	25,990,000	12	28,589,000	12	31,447,900	36	86,026,900	
				3.30.04.2.03.0003	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	laporan			12	25,990,000	12	28,589,000	12	31,447,900	36	86,026,900	
				3.30.05.2.	Program pengembangan ekspor	Percentage Peningkatan ekspor pelaku usaha yang terfasilitasi	%	100		100	1,478,417,350	100	1,628,259,085	100	1,788,884,994	100	4,893,561,429	
				3.30.05.2.01.	Kegiatan penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi dan misi dagang	pelaku usaha	18		410	1,478,417,350	410	1,628,259,085	410	1,788,884,994	1230	4,893,561,429	
				3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	pelaku usaha			38	724,303,500	38	796,733,850	38	876,407,235	114	2,397,444,585	
				3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	pelaku usaha			345	552,508,900	345	607,759,790	345	668,535,769	1035	1,828,804,459	
				3.30.05.2.01.0004	Misi dagang bagi produk ekspor unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	pelaku usaha			27	201,604,950	27	379,668,465	27	591,328,634	81	1,172,602,049	
				3.30.06.2.	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Percentage alat UTPP yang sesuai standar	%	116.78		98.85	218,828,600	97.77	241,918,160	97.77	268,111,065	97.77	727,956,715	
				3.30.06.2.01.	Kegiatan pelaksanaan metrolog legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Tingkat kepuasan pengguna layanan metrologian	%			77	219,926,500	77	241,919,160	77	266,111,065	231	727,956,715	
				3.30.06.2.01.01	Relaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	unit			6,000	165,900,000	6,500	182,490,000	6,500	200,739,000	19000	549,129,000	
				3.30.06.2.01.02	Pengawasan / penyaluran metrologi legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	orang			12	54,026,500	15	59,429,150	15	65,372,065	42	178,827,715	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				3.30.07.2.	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pro sentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi	%	4.52	4.50	369,037,500	4.50	394,941,250	4.50	434,435,375	4.5	1,188,414,125	
				3.30.07.2.01.	Kegiatan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi perdagangan	UMKM		50	359,037,500	50	394,941,250	50	434,435,375	150	1,188,414,125	
				3.30.07.2.01.0002	Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat lab/kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM		50	359,037,500	50	394,941,250	50	434,435,375	150	1,188,414,125	
Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perdagangan dan Industri Kecil dan Menengah	Produktivitas IKM	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Produktivitas tenaga kerja industri				%		70,50		70,50		71,00		71,00		
				3.31.02.2.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Produktivitas tenaga kerja industri	Rp/Org	0.8	0.8	3,097,713,750	0.8	3,407,485,125	0.8	3,748,233,638	0.8	10,253,432,513	
				3.31.02.2.01.	Kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri lab/kota	Jumlah monitoring hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kegiatan	dokumen		4	3,097,713,750	4	3,407,485,125	4	3,748,233,638	12	10,253,432,513	
				3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	dokumen		1	25,227,250	1	27,749,975	1	30,524,973	3	83,502,198	
				3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen		1		1		1		3		
				3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen		1	2,063,067,400	1	2,269,374,140	1	2,496,311,554	3	6,828,753,094	
				3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen		1	1,009,419,100	1	1,110,361,010	1	1,221,397,111	3	3,341,177,221	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pro sentase produk yang sudah terstandarisasi dan HKI				%		70.25		70.55		70.85		71.15			
				3.31.03.2.	Program pengendalian lain usaha industri kabupaten/kota	Persentase fasilitas legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah	%	80		80	18,082,500	80	17,890,750	80	18,459,825	80	53,233,075	
				3.31.03.2.01.	Kegiatan penanaman lain Usaha Industri (UI), lain Perluasan Usaha Industri (IPUI), lain Usaha Kawasan Industri (UKI), dan lain Perluasan Kawasan Industri (PKI) kewenangan kab/kota	Jumlah rekomendasi lain Usaha Industri (UI), lain Perluasan Usaha Industri (IPUI), lain Usaha Kawasan Industri (UKI), dan lain Perluasan Kawasan Industri (PKI) yang diterbitkan	RJU				16,082,500		17,690,750		19,459,825	0	53,233,075	
				3.31.03.2.01.0004	Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penanaman perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penanaman perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Rendah dan Tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Perizinan Model Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	dokumen			1	5,750,000	1	6,325,000	1	6,957,500	3	19,032,500	
				3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen			1	10,332,500	1	11,365,750	1	12,502,525	3	34,200,575	
			Pro sentase pertumbuhan pelaku usaha IKM				%	80	80		80		80		80			
				3.31.04.2.01	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase pengawasan industri dalam SIINas	%	80		80	143,822,000	80	158,204,200	80	174,024,820	240	478,060,820	
				3.31.04.2.01.	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk UI, IPUI, UKI, dan IPKI kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen Informasi Industri untuk UI, IPUI, UKI, dan IPKI kewenangan kabupaten	dokumen			1	143,822,000	1	158,204,200	1	174,024,820	3	478,060,820	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				3.31.04.2.01.0001	Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri, serta data lain lingkup kab/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dokumen			1	102.000,000	1	112.200,000	1	123.420,000	3	337.620,000	
				3.31.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampalan Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampalan Data ke SIINas	dokumen			1	41,822,000	1		1		3	41,822,000	
											39,376,348,247		43,312,884,172		47,844,172,689		130,332,408,008	

## Rencana Pengarustamaan Gender (PUG)

Dalam perencanaan pendanaan kegiatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga menyiapkan untuk rencana program dan kegiatan dalam Pengarustamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Dengan gambaran bahwa Gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggungjawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Pengarustamaan gender adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Dikatakan terjadi kesenjangan gender apabila salah satu jenis kelamin berada dalam keadaan gertinggal dibandingkan jenis kelamin lainnya (laki-laki lebih banyak dari perempuan atau sebaliknya). Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Adapun indikator kesetaraan gender adalah sebagai berikut :

1. AKSES; peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu.
2. PARTISIPASI; merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
3. KONTROL; penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.
4. MANFAAT; kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil organisasi memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sudah melaksanakan rencana program dan kegiatan dalam pengarustamaan gender (PUG) melalui perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG). Sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 dijelaskan bahwa : (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD; (2) Penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan bespektif gender dilakukan melalui analisis gender. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 67 Tahun 2011 disebutkan bahwa hasil analisis gender dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) dan selanjutnya hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dalam menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

Dalam rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah menyusun dan menganggarkan program dan kegiatan yang berbasis Gender dengan harapan penyusunan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas (baik laki-laki maupun perempuan).

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dapat secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2024-2026, Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah yang telah dijabarkan pada bab III serta struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program.

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan. Indikator kinerja program juga merupakan kerangka akuntabilitas dalam mengukur pencapaian kinerja unit organisasi dalam mendukung kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Pada Renstra ini juga telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat Eselon II di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat Eselon III.

Indikator kinerja sub kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran dari suatu kegiatan. Indikator kinerja sub kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja pada sub kegiatan berkaitan dengan sasaran sub kegiatan. Indikator kinerja sub kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan sasaran kinerja sub kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat Eselon IV.

## 1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Sasaran dan indikator sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah: 1) Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah, 2) Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan dengan indikator Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan, 3) Meningkatnya Pertumbuhan IKM dengan indikator Produktivitas tenaga kerja industri, Prosentase produk yang sudah terstandarisasi dan HKI, dan Prosentase pertumbuhan pelaku usaha IKM. Adapun target capaian dari indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

Tabel 6.1 : Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja (%)		Target Kinerja (%)				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	73.04	74.37	79	79.02	79.04	79.06	79.06 (BB)
2.	Pertumbuhan ekonomi Daerah	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan	20.04	20.3	20.5	20.5	20.7	20.8	20.63%
3.	Produktivitas IKM	Produktivitas tenaga kerja industri	69.51	70.6	70.8	71	71.6	71.8	71.30%
		Prosentase produk yang sudah terstandarisasi dan HKI	69.95	70.6	70.8	71	71.6	71.8	71.30%
		Prosentase pertumbuhan pelaku usaha IKM	80.01	80.78	81	81.2	81.4	81.6	81.30%

## 2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Penyusunan dan penyampaian laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci Output (keluaran) dan IKK Outcome (hasil) yang merupakan gambaran dari keberhasilan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Tabel 6.2 : Target Keberhasilan Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024-2026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Urusan	IKK Outcome/Hasil	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja (%)		Target Kinerja (%)		
				2021	2022	2024	2025	2026
1.	PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: a. Pusat Perbelanjaan b. Toko Swalayan	21.67	22.22	22.78	23.33	23.89
			2. Persentase penerbitan TDG	33.33	34.78	36.23	37.68	39.13
			3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	19	19	19	19	19
			4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	9.44	10	10.56	11.11	11.67
			5. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100	100	100	100	100
			6. Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	-	-	-	-	-
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	7. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	117.58	120.52	122.97	124.14	125.90
		8. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		100	100	100	100	100

No	Urusan	IKK Outcome/Hasil	IKK Output/Keluaran	Capaian Kinerja (%)		Target Kinerja (%)		
				2021	2022	2024	2025	2026
2.	PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	9. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	-				
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dlm RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota)	10. Persentase terselesainya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	-				
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	11. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100	100	100	100	100
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	12. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	-				
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota - Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	13. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/ Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/ Kota	70				



## **BAB VIII PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang dan sebagaimana berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023. Penyusunan Renstra PD tersebut juga dalam rangka penyesuaian Permendari Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan/sub kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang telah menetapkan sasaran strategis yaitu :

- Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah
- Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan
- Meningkatnya Pertumbuhan IKM

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang juga telah menetapkan indikator-indikator dari masing-masing sasaran strategis sehingga pencapaian dari masing-masing sasaran strategis dapat diukur dan dimonitor. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan 10 (sepuluh) program yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategis pembangunan Kabupaten Jombang.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.
- b) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian setiap tahunnya dalam periode tersebut, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang untuk tahun yang sama.

- c) Penguatan peran stakeholder perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Penguatan peran stakeholder ini antara lain dapat dilakukan melalui proses sosialisasi, pelatihan, promosi, pembinaan baik kepada masyarakat luas maupun perusahaan-perusahaan, serta seluruh komponen aparat di lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang.
- d) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2024-2026 ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini dapat berjalan efektif.
- e) Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah menyusun dan menganggarkan program dan kegiatan yang berbasis Gender yang tertuang dalam pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG).

Penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut.

**Mapping Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur pada Matriks Renstra PD Tahun 2024-2026  
Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

**Renstra PD tahun 2024-2026 Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021**

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatnya Akuntabilitasnya dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitasnya dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah					BB	A (81,5)		A (81,25)		A (83)		A (82)			
				3.30.01.2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	%	100		100	11,932,779,809	100	13,126,057,790	100	14,438,663,569	100	39,497,501,168	
				3.30.01.2.0	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai aturan	dokumen	7		8	15,189,650	8	16,708,615	8	18,379,477	24	50,277,742	
				3.30.01.2.0	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen			3	7,489,850	3	8,238,835	3	9,062,719	9	24,791,404	
				3.30.01.2.0	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan			5	7,699,800	5	8,469,780	5	9,316,758	15	25,486,338	
				3.30.01.2.0	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	bulan	12		12	9,110,733,681	12	10,021,807,049	12	11,023,987,754	36	30,156,528,484	
				3.30.01.2.0	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang			66	8,768,859,831	66	9,645,745,814	66	10,610,320,396	198	29,024,926,041	
				3.30.01.2.0	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen			12	338,874,000	12	372,761,400	12	410,037,540	36	1,121,672,940	
				3.30.01.2.0	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan			1	1,999,900	1	2,199,890	1	2,419,879	3	6,619,669	
				3.30.01.2.0	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	laporan			17	999,950	17	1,099,945	17	1,209,940	51	3,309,835	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				3.30.01.2.0 5.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	bulan	12		12	93,200,000	12	140,520,000	12	196,372,000	36	430,092,000	
				3.30.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket			233	93,200,000	233	102,520,000	233	112,772,000	699	308,492,000	
				3.30.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	org					20	38,000,000	20	41,800,000	40	79,800,000	
				3.30.01.2.0 6.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	bulan			12	813,534,478	12	894,887,926	12	984,376,718	36	2,692,799,122	
				3.30.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket			27	36,532,200	27	40,185,420	27	44,203,962	81	120,921,582	
				3.30.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket			64	60,245,128	64	66,269,641	64	72,896,605	192	199,411,374	
				3.30.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket			9	6,997,300	9	7,697,030	9	8,466,733	27	23,161,063	
				3.30.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket			5	240,430,000	5	264,473,000	5	290,920,300	15	795,823,300	
				3.30.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket			17	300,729,850	17	330,802,835	17	363,883,119	51	995,415,804	
				3.30.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen			2	111,280,000	2	122,408,000	2	134,648,800	6	368,336,800	
				3.30.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan			25	57,320,000	25	63,052,000	25	69,357,200	75	189,729,200	
				3.30.01.2.0 3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	laporan			4	17,493,800	4	19,243,180	4	21,167,498	4	57,904,478	
				3.30.01.2.0 3.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan			4	17,493,800	4	19,243,180	4	21,167,498	12	57,904,478	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				3.30.01.2.07.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan penunjang kantor urusan pemerintah daerah	unit	9		2	200,000,000	2	220,000,000	2	242,000,000	6	662,000,000	
				3.30.01.2.07.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit			2	200,000,000	2	220,000,000	2	242,000,000	6	662,000,000	
				3.30.01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan penunjang kantor urusan pemerintah daerah	bulan	12		12	1,024,303,200	12	1,126,733,520	12	1,239,406,872	36	3,390,443,592	
				3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan			12	503,400,000	12	553,740,000	12	609,114,000	36	1,666,254,000	
				3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan			12	520,903,200	12	572,993,520	12	630,292,872	36	1,724,189,592	
				3.30.01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik	unit			129	658,325,000	129	724,157,500	129	796,573,250	129	2,179,055,750	
				3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit			1	38,610,000	1	42,471,000	1	46,718,100	3	127,799,100	
				3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit			38 46	238,215,000	38 46	262,036,500	38 46	288,240,150	114 138	788,491,650	
				3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit			1	240,000,000	1	264,000,000	1	290,400,000	3	794,400,000	
				3.30.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit			90	141,500,000	90	155,650,000	90	171,215,000	270	468,365,000	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi Daerah	Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan				%	21.12		21.12		21.32		21.52		21.52		
				3.30.02.2.	Program perijinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase penerbitan rekomendasi perijinan	%			100	77,490,250	100	85,239,275	100	93,763,203	100	256,492,728	
				3.30.02.2.0	Kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan	Jumlah ijin usaha perdagangan yang diterbitkan	RIU			6	13,875,000	6	15,262,500	6	16,788,750	18	45,926,250	
				3.30.02.2.0	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi secara elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen			6	13,875,000	6	15,262,500	6	16,788,750	18	45,926,250	
				3.30.02.2.0	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah rekomendasi ijin usaha Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan	RIU			10	52,490,500	10	57,739,550	10	63,513,505	30	173,743,555	
				3.30.02.2.0	Fasilitasi penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	dokumen			10	52,490,500	10	57,739,550	10	63,513,505	30	173,743,555	
				3.30.02.2.0	Kegiatan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah rekomendasi ijin usaha Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang diterbitkan	RIU			4	11,124,750	4	12,237,225	4	13,460,948	12	36,822,923	
				3.30.02.2.0	Fasilitasi perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen			4	11,124,750	4	12,237,225	4	13,460,948	12	36,822,923	
				3.30.03.2.	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah	%	110.84		100	21,424,576,088	100	23,567,033,697	100	25,923,737,066	100	70,915,346,851	
				3.30.03.2.0	Kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dicukupi	pasar daerah				21,131,113,088		23,244,224,397		25,568,646,836		69,943,984,321	
				3.30.03.2.0	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	unit			18	17,928,442,200	18	19,721,286,420	18	21,693,415,062	54	59,343,143,682	
				3.30.03.2.0	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit			16	3,202,670,888	16	3,522,937,977	16	3,875,231,774	48	10,600,840,639	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				3.30.03.2.0 2.	Kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Tingkat kepuasan kinerja personalia pengelola pasar daerah terhadap pedagang pasar	%			77	293,463,000	77	322,809,300	77	355,090,230	231	971,362,530	
				3.30.03.2.0 2.01	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen			12	132,420,000	12	145,662,000	12	160,228,200	36	438,310,200	
				3.30.03.2.0 2.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen			4	161,043,000	4	177,147,300	4	194,862,030	12	533,052,330	
				<b>3.30.04.2.</b>	<b>Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	<b>Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil</b>	<b>%</b>	<b>14.29</b>		<b>14.29</b>	<b>125,503,500</b>	<b>14.29</b>	<b>138,053,850</b>	<b>14.29</b>	<b>151,859,235</b>	<b>14.29</b>	<b>415,416,585</b>	
				3.30.04.2.0 1.	Kegiatan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kab/kota	Jumlah hasil monitoring ketersediaan bapokting yang ditindaklanjuti	laporan	12		12	17,438,500	12	19,182,350	12	21,100,585	36	57,721,435	
				3.30.04.2.0 1.01	Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	laporan			12	10,995,000	12	12,094,500	12	13,303,950	36	36,393,450	
				3.30.04.2.0 1.03	Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	laporan			12	6,443,500	12	7,087,850	12	7,796,635	36	21,327,985	
				3.30.04.2.0 2.	Kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kab/kota	Jumlah komoditas bapokting yang terkendali	komoditas	3		3	82,075,000	3	90,282,500	3	99,310,750	9	271,668,250	
				3.30.04.2.0 2.02	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	laporan			13	58,075,000	13	63,882,500	13	70,270,750	39	192,228,250	
				3.30.04.2.0 2.03	Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kab/kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan			8	24,000,000	8	26,400,000	8	29,040,000	24	79,440,000	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				3.30.04.2.0 3.	Kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pengawasan, penyaluran yang ditindaklanjuti	laporan	12		12	25,990,000	12	28,589,000	12	31,447,900	36	86,026,900	
				3.30.04.2.0 3.03	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	laporan			12	25,990,000	12	28,589,000	12	31,447,900	36	86,026,900	
				<b>3.30.05.2.</b>	<b>Program pengembangan ekspor</b>	<b>Presentase Peningkatan ekspor pelaku usaha yang terfasilitasi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>1,478,417,350</b>	<b>100</b>	<b>1,626,259,085</b>	<b>100</b>	<b>1,788,884,994</b>	<b>100</b>	<b>4,893,561,429</b>	
				3.30.05.2.0 1.	Kegiatan penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi dan misi dagang	pelaku usaha	18		410	1,478,417,350	410	1,626,259,085	410	1,788,884,994	1230	4,893,561,429	
				3.30.05.2.0 1.01	Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	pelaku usaha			20	143,548,200	20	157,903,020	20	173,693,322	60	475,144,542	
				3.30.05.2.0 1.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	pelaku usaha			38	724,303,500	38	796,733,850	38	876,407,235	114	2,397,444,585	
				3.30.05.2.0 1.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	pelaku usaha			345	552,508,900	345	607,759,790	345	668,535,769	1035	1,828,804,459	
				3.30.05.2.0 1.04	Misi dagang bagi produk ekspor unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	pelaku usaha			7	58,056,750	7	63,862,425	7	70,248,668	21	192,167,843	
				<b>3.30.06.2.</b>	<b>Program standarisasi dan perlindungan konsumen</b>	<b>Persentase alat UTPP yang sesuai standar</b>	<b>%</b>	<b>116.76</b>		<b>96.85</b>	<b>219,926,500</b>	<b>97.77</b>	<b>241,919,150</b>	<b>97.77</b>	<b>266,111,065</b>	<b>97.77</b>	<b>727,956,715</b>	
				3.30.06.2.0 1.	Kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Tingkat kepuasan pengguna layanan kemetrologian	%			77	219,926,500	77	241,919,150	77	266,111,065	231	727,956,715	
				3.30.06.2.0 1.01	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	unit			6,000	165,900,000	6,500	182,490,000	6,500	200,739,000	19000	549,129,000	
				3.30.06.2.0 1.02	Pengawasan / penyuluhan metrologi legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	orang			12	54,026,500	15	59,429,150	15	65,372,065	42	178,827,715	
				<b>3.30.07.2.</b>	<b>Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri</b>	<b>Prosentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi</b>	<b>%</b>	<b>4.52</b>		<b>4.50</b>	<b>359,037,500</b>	<b>4.50</b>	<b>394,941,250</b>	<b>4.50</b>	<b>434,435,375</b>	<b>4.5</b>	<b>1,188,414,125</b>	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				3.30.07.2.0 1.	Kegiatan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi perdagangan	UMKM			50	359,037,500	50	394,941,250	50	434,435,375	150	1,188,414,125	
				3.30.07.2.0 1.02	Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kab/kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM			50	359,037,500	50	394,941,250	50	434,435,375	150	1,188,414,125	
				3.30.07.2.0 1.03	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	pelaku usaha											
<b>Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perdagangan dan Industri Kecil dan Menengah</b>	<b>Produktivitas IKM</b>	<b>Meningkatnya Pertumbuhan IKM</b>	<b>Produktivitas tenaga kerja industri</b>				%	70.00%		70,25		75		75		75		
				3.31.02.2.	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>	<b>Produktivitas tenaga kerja industri</b>	Rp/Org	0.8		0.8	3,097,713,750	0.8	3,407,485,125	0.8	3,748,233,638	0.8	10,253,432,513	
				3.31.02.2.0 1.	Kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kab/kota	Jumlah monitoring hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kegiatan	dokumen			4	3,097,713,750	4	3,407,485,125	4	3,748,233,638	12	10,253,432,513	
				3.31.02.2.0 1.02	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	dokumen			1	25,227,250	1	27,749,975	1	30,524,973	3	83,502,198	
				3.31.02.2.0 1.03	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen			1		1		1		3		
				3.31.02.2.0 1.04	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen			1	2,063,067,400	1	2,269,374,140	1	2,496,311,554	3	6,828,753,094	
				3.31.02.2.0 1.05	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen			1	1,009,419,100	1	1,110,361,010	1	1,221,397,111	3	3,341,177,221	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			<b>Prosentase produk yang sudah terstandarisasi dan HKI</b>				%			70.25	70.55	70.85	71.15					
				3.31.03.2.	<b>Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota</b>	<b>Persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah</b>	%	80		80	16,082,500	80	17,690,750	80	19,459,825	80	53,233,075	
				3.31.03.2.0 1.	Kegiatan penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kab/kota	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan	RIU				16,082,500		17,690,750		19,459,825	0	53,233,075	
				3.31.03.2.0 1.01	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, IPKI kewenangan kab/kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	dokumen			1	5,750,000	1	6,325,000	1	6,957,500	3	19,032,500	
				3.31.03.2.0 1.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, IPKI kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen			1	10,332,500	1	11,365,750	1	12,502,325	3	34,200,575	
			<b>Prosentase pertumbuhan pelaku usaha IKM</b>				%	80		80	80	80	80					
				3.31.04.2.0 1	<b>Program pengelolaan sistem informasi industri nasional</b>	<b>Persentase pengawasan industri dalam SIINas</b>	%			80	143,822,000	80	158,204,200	80	174,024,620	80	476,050,820	
				3.31.04.2.0 1.	Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten	dokumen			1	143,822,000	1	158,204,200	1	174,024,620	3	476,050,820	
				3.31.04.2.0 1.01	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri, serta data lain lingkup kab/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dokumen			1	102,000,000	1	112,200,000	1	123,420,000	3	337,620,000	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				3.31.04.2.0 1.03	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	dokumen			1	41,822,000	1		1		3	41,822,000	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
<b>Matriks Renstra Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317 Tahun 2023</b>																		
Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah					78 (BB)	79 (BB)		80 (A)		80 (A)		80 (A)			
				3.30.01.2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	%	100		100	12,432,779,809	100	13,676,057,790	100	15,043,663,569	100	41,152,501,168	
				3.30.01.2.0	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	dokumen	7		8	15,189,650	8	16,708,615	8	18,379,477	24	50,277,742	
				3.30.01.2.0	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen			3	7,489,850	3	8,238,835	3	9,062,719	9	24,791,404	
				3.30.01.2.0	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan			5	7,699,800	5	8,469,780	5	9,316,758	15	25,486,338	
				3.30.01.2.0	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	bulan	12		12	9,110,733,681	12	10,021,807,049	12	11,023,987,754	36	30,156,528,484	
				3.30.01.2.0	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang			66	8,768,859,831	66	9,645,745,814	66	10,610,320,396	198	29,024,926,041	
				3.30.01.2.0	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen			12	338,874,000	12	372,761,400	12	410,037,540	36	1,121,672,940	
				3.30.01.2.0	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan			1	1,999,900	1	2,199,890	1	2,419,879	3	6,619,669	
3.30.01.2.0	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	laporan			17	999,950	17	1,099,945	17	1,209,940	51	3,309,835					

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				3.30.01.2.0 5.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	bulan	12		12	93,200,000	12	140,520,000	12	196,372,000	36	430,092,000	
				3.30.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket			233	93,200,000	233	102,520,000	233	112,772,000	699	308,492,000	
				3.30.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	org					20	38,000,000	20	41,800,000	40	79,800,000	
				3.30.01.2.0 6.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	bulan			12	813,534,478	12	894,887,926	12	984,376,718	36	2,692,799,122	
				3.30.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket			27	36,532,200	27	40,185,420	27	44,203,962	81	120,921,582	
				3.30.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket			64	60,245,128	64	66,269,641	64	72,896,605	192	199,411,374	
				3.30.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket			9	6,997,300	9	7,697,030	9	8,466,733	27	23,161,063	
				3.30.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket			5	240,430,000	5	264,473,000	5	290,920,300	15	795,823,300	
				3.30.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket			17	300,729,850	17	330,802,835	17	363,883,119	51	995,415,804	
				3.30.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen			2	111,280,000	2	122,408,000	2	134,648,800	6	368,336,800	
				3.30.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan			25	57,320,000	25	63,052,000	25	69,357,200	75	189,729,200	
				3.30.01.2.0 3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	unit	4		4	17,493,800	4	19,243,180	4	21,167,498	4	57,904,478	
				3.30.01.2.0 3.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan			4	17,493,800	4	19,243,180	4	21,167,498	12	57,904,478	
				3.30.01.2.0 7.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	unit	9		2	700,000,000	2	770,000,000	2	847,000,000	6	2,317,000,000	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				3.30.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	unit			1	500,000,000	1	550,000,000	1	605,000,000	1	1,655,000,000	
				3.30.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit			2	200,000,000	2	220,000,000	2	242,000,000	6	662,000,000	
				3.30.01.2.0 8.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan penunjang kantor urusan pemerintah daerah	bulan	12		12	1,024,303,200	12	1,126,733,520	12	1,239,406,872	36	3,390,443,592	
				3.30.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan			12	503,400,000	12	553,740,000	12	609,114,000	36	1,666,254,000	
				3.30.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan			12	520,903,200	12	572,993,520	12	630,292,872	36	1,724,189,592	
				3.30.01.2.0 9.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik	unit			129	658,325,000	129	724,157,500	129	796,573,250	129	2,179,055,750	
				3.30.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit			1	38,610,000	1	42,471,000	1	46,718,100	3	127,799,100	
				3.30.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit			38 46	238,215,000	38 46	262,036,500	38 46	288,240,150	114 138	788,491,650	
				3.30.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit			1	240,000,000	1	264,000,000	1	290,400,000	3	794,400,000	
				3.30.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit			90	141,500,000	90	155,650,000	90	171,215,000	270	468,365,000	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi Daerah	Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan				%	20		21.12		21.32		21.52		21.72		
				3.30.02.2.	Program perijinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase penerbitan rekomendasi perijinan	%	100		100	77,490,250	100	85,239,275	100	93,763,203	300	256,492,728	
				3.30.02.2.0	Kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan	Jumlah ijin usaha perdagangan yang diterbitkan	RIU			6	13,875,000	6	15,262,500	6	16,788,750	18	45,926,250	
				3.30.02.2.0	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi secara elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen			6	13,875,000	6	15,262,500	6	16,788,750	18	45,926,250	
				3.30.02.2.0	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah rekomendasi ijin usaha Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan	RIU			10	52,490,500	10	57,739,550	10	63,513,505	30	173,743,555	
				3.30.02.2.0	Fasilitasi penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	dokumen			10	52,490,500	10	57,739,550	10	63,513,505	30	173,743,555	
				3.30.02.2.0	Kegiatan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah rekomendasi ijin usaha Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang diterbitkan	RIU			4	11,124,750	4	12,237,225	4	13,460,948	12	36,822,923	
				3.30.02.2.0	Fasilitasi perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen			4	11,124,750	4	12,237,225	4	13,460,948	12	36,822,923	
				3.30.03.2.	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah	%	110.84		100	21,424,576,088	100	23,567,033,697	100	25,923,737,066	100	70,915,346,851	
				3.30.03.2.0	Kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dicukupi	pasar daerah				21,131,113,088		23,244,224,397		25,568,646,836		69,943,984,321	
				3.30.03.2.0	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	unit			18	17,928,442,200	18	19,721,286,420	18	21,693,415,062	54	59,343,143,682	
3.30.03.2.0	Fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit			16	3,202,670,888	16	3,522,937,977	16	3,875,231,774	48	10,600,840,639					

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				3.30.03.2.0 2.	Kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Tingkat kepuasan kinerja personalia pengelola pasar daerah terhadap pedagang pasar	%			77	293,463,000	77	322,809,300	77	355,090,230	231	971,362,530	
				3.30.03.2.0 2.01	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen			12	132,420,000	12	145,662,000	12	160,228,200	36	438,310,200	
				3.30.03.2.0 2.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen			4	161,043,000	4	177,147,300	4	194,862,030	12	533,052,330	
				<b>3.30.04.2.</b>	<b>Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	<b>Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil</b>	<b>%</b>	<b>14.29</b>		<b>14.29</b>	<b>125,503,500</b>	<b>14.29</b>	<b>138,053,850</b>	<b>14.29</b>	<b>151,859,235</b>	<b>14.29</b>	<b>415,416,585</b>	
				3.30.04.2.0 1.	Kegiatan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kab/kota	Jumlah hasil monitoring ketersediaan bapokting yang ditindaklanjuti	laporan	12		12	17,438,500	12	19,182,350	12	21,100,585	36	57,721,435	
				3.30.04.2.0 1.0001	Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	laporan			12	10,995,000	12	12,094,500	12	13,303,950	36	36,393,450	
				3.30.04.2.0 1.0003	Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	laporan			12	6,443,500	12	7,087,850	12	7,796,635	36	21,327,985	
				3.30.04.2.0 2.	Kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kab/kota	Jumlah komoditas bapokting yang terkendali	komoditas	3		3	82,075,000	3	90,282,500	3	99,310,750	9	271,668,250	
				3.30.04.2.0 2.0002	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	laporan			13	58,075,000	13	63,882,500	13	70,270,750	39	192,228,250	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				3.30.04.2.0 2.0003	Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kab/kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan			8	24,000,000	8	26,400,000	8	29,040,000	24	79,440,000	
				3.30.04.2.0 3.	Kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pengawasan, penyaluran yang ditindaklanjuti	laporan	12		12	25,990,000	12	28,589,000	12	31,447,900	36	86,026,900	
				3.30.04.2.0 3.0003	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	laporan			12	25,990,000	12	28,589,000	12	31,447,900	36	86,026,900	
				<b>3.30.05.2.</b>	<b>Program pengembangan ekspor</b>	<b>Presentase Peningkatan ekspor pelaku usaha yang terfasilitasi</b>	<b>%</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>1,478,417,350</b>	<b>100</b>	<b>1,626,259,085</b>	<b>100</b>	<b>1,788,884,994</b>	<b>100</b>	<b>4,893,561,429</b>	
				3.30.05.2.0 1.	Kegiatan penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi dan misi dagang	pelaku usaha	18		410	1,478,417,350	410	1,626,259,085	410	1,788,884,994	1230	4,893,561,429	
				3.30.05.2.0 1.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	pelaku usaha			38	724,303,500	38	796,733,850	38	876,407,235	114	2,397,444,585	
				3.30.05.2.0 1.0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	pelaku usaha			345	552,508,900	345	607,759,790	345	668,535,769	1035	1,828,804,459	
				3.30.05.2.0 1.0004	Misi dagang bagi produk ekspor unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	pelaku usaha			27	201,604,950	27	379,668,465	27	591,328,634	81	1,172,602,049	
				<b>3.30.06.2.</b>	<b>Program standarisasi dan perlindungan konsumen</b>	<b>Persentase alat UTTP yang sesuai standar</b>	<b>%</b>	<b>116.76</b>		<b>96.85</b>	<b>219,926,500</b>	<b>97.77</b>	<b>241,919,150</b>	<b>97.77</b>	<b>266,111,065</b>	<b>97.77</b>	<b>727,956,715</b>	
				3.30.06.2.0 1.	Kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Tingkat kepuasan pengguna layanan kemetrolagian	<b>%</b>			<b>77</b>	<b>219,926,500</b>	<b>77</b>	<b>241,919,150</b>	<b>77</b>	<b>266,111,065</b>	<b>231</b>	<b>727,956,715</b>	
				3.30.06.2.0 1.01	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	unit			6,000	165,900,000	6,500	182,490,000	6,500	200,739,000	19000	549,129,000	
				3.30.06.2.0 1.02	Pengawasan / penyuluhan metrologi legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	orang			12	54,026,500	15	59,429,150	15	65,372,065	42	178,827,715	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				3.30.07.2.	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Prosentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi	%	4.52		4.50	359,037,500	4.50	394,941,250	4.50	434,435,375	4.5	1,188,414,125	
				3.30.07.2.0 1.	Kegiatan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi perdagangan	UMKM			50	359,037,500	50	394,941,250	50	434,435,375	150	1,188,414,125	
				3.30.07.2.0 1.0002	Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kab/kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM			50	359,037,500	50	394,941,250	50	434,435,375	150	1,188,414,125	
Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perdagangan dan Industri Kecil dan Menengah	Produktivitas IKM	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Produktivitas tenaga kerja industri				%			70,30		70,50		71,00		71,00		
				3.31.02.2.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Produktivitas tenaga kerja industri	Rp/Org	0.8		0.8	3,097,713,750	0.8	3,407,485,125	0.8	3,748,233,638	0.8	10,253,432,513	
				3.31.02.2.0 1.	Kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kab/kota	Jumlah monitoring hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kegiatan	dokumen			4	3,097,713,750	4	3,407,485,125	4	3,748,233,638	12	10,253,432,513	
				3.31.02.2.0 1.0002	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	dokumen			1	25,227,250	1	27,749,975	1	30,524,973	3	83,502,198	
				3.31.02.2.0 1.0003	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen			1		1		1		3		
				3.31.02.2.0 1.0004	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen			1	2,063,067,400	1	2,269,374,140	1	2,496,311,554	3	6,828,753,094	
				3.31.02.2.0 1.0005	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen			1	1,009,419,100	1	1,110,361,010	1	1,221,397,111	3	3,341,177,221	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN	
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			<b>Prosentase produk yang sudah terstandarisasi dan HKI</b>				%			70.25	70.55	70.85	71.15					
				3.31.03.2.	<b>Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota</b>	<b>Persentase fasilitas legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah</b>	%	80		80	16,082,500	80	17,690,750	80	19,459,825	80	53,233,075	
				3.31.03.2.0 1.	Kegiatan penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kab/kota	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan	RIU				16,082,500		17,690,750		19,459,825	0	53,233,075	
				3.31.03.2.0 1.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	dokumen			1	5,750,000	1	6,325,000	1	6,957,500	3	19,032,500	
				3.31.03.2.0 1.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen			1	10,332,500	1	11,365,750	1	12,502,325	3	34,200,575	
			<b>Prosentase pertumbuhan pelaku usaha IKM</b>				%	80		80	80	80	80					
				3.31.04.2.0 1	<b>Program pengelolaan sistem informasi industri nasional</b>	<b>Persentase pengawasan industri dalam SIINas</b>	%	80		80	143,822,000	80	158,204,200	80	174,024,620	240	476,050,820	
				3.31.04.2.0 1.	Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen informasi industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten	dokumen			1	143,822,000	1	158,204,200	1	174,024,620	3	476,050,820	

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026		KETERANGAN
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				3.31.04.2.0 1.0001	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri, serta data lain lingkup kab/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dokumen			1	102,000,000	1	112,200,000	1	123,420,000	3	337,620,000	
				3.31.04.2.0 1.0003	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	dokumen			1	41,822,000	1		1		3	41,822,000	
											<b>39,375,349,247</b>		<b>43,312,884,172</b>		<b>47,644,172,589</b>		<b>130,332,406,008</b>	